

ENEWSLETTER

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi September | Tahun 2025 No. 64

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif



Fraksi PKS Dorong Evaluasi Prolegnas 2025

*dan Usulkan Tambahan
RUU Prioritas*

*Hj. Ledia Hanifa A.,
S.Si., M.Psi.T.*



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Kreatif, Atraktif, Substantif



Pimpinan FRAKSI PKS DPR RI

Kreatif, Atraktif, Substantif



KETUA FRAKSI

**Dr. H. ABDUL
KHARIS
ALMASYHARI**
S.E., M.Sc., A.M.

WAKIL
SEKRETARIS

**IZZUDDIN
ALQASSAM
KASUBA**

SEKRETARIS

**Hj. LEDIA
HANIFA
AMALIAH**
S.S., M.P.S.T.

WAKIL
AHARA

**ISMAIL
BACHTIAR**

BENDAHARA

**Dr. Hj. KURNIASIH
MUFIDAYATI** M.S.

WAKABID POLNIRAM

Dr. H. SUKAMTA

WAKABID KESRA

**Dr. Hj. NETTY
PRASETIYANI** M.S.

WAKABID KINEFA

**Drs. H. ADANG
DARADJATUN**

WAKABID EKKU

AMIN AK M.M.

WAKABID INBANG

ABDUL HADI
S.E., M.M.

Mardani Ali Sera Dorong ATR/BPN Jadi Motor Utama Reformasi Agraria

Jakarta (08/09) — Anggota Komisi II Fraksi PKS DPR RI, Mardani Ali Sera, menggelar rapat kerja bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membahas berbagai isu strategis terkait tata kelola pertanahan, reformasi agraria, serta pengembangan bank tanah.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Menteri ATR/BPN atas koordinasi dan kolaborasi lintas kementerian yang telah dilakukan. Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan agraria yang seringkali melibatkan banyak pihak.

“Saya memahami bahwa banyak permasalahan pertanahan yang sebenarnya berada di luar kewenangan ATR/BPN. Karena itu, koordinasi, kolaborasi, dan diplomasi lintas sektor menjadi sesuatu yang sangat diperlukan. Bahkan, ada hal-hal

yang mungkin tidak bisa dibuka ke publik, tetapi sangat penting untuk diketahui dan dikoordinasikan bersama. Jika ini berhasil, banyak kasus tanah baik kawasan hutan maupun milik negara seperti Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kepolisian dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi rujukan untuk penyelesaian kasus serupa,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyinggung pemikiran ekonom peraih Nobel asal Peru, Hernando de Soto, yang menekankan pentingnya reformasi agraria bagi kesejahteraan masyarakat. Reformasi agraria tersebut menca-

kup dua aspek yaitu reformasi aset dan reformasi akses.

“Setahu saya, perangkat hukum terkait reformasi aset sudah sangat baik di Kementerian ATR/BPN. Ke depan, kita perlu mendorong agar kementerian ini mengoptimalkan pemanfaatan tanah, menjadi leading sector dalam grand design tata ruang, dan memastikan tanah dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Dengan itu, target pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo bisa tercapai,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa optimalisasi tanah dan tata ruang harus berjalan beriringan dengan kedisiplinan publik dalam membayar pajak serta prinsip pembangunan yang adil. Terkait perkembangan bank tanah, ia mendorong agar inovasi yang sudah ada diperkuat sebagai solusi atas keterbatasan lahan ketika investor masuk.

“Di periode lalu, kita sudah mengenal inovasi bank tanah. Namun, isinya masih rendah. Padahal, ketika investor datang dan menanyakan lahan sering kali kita tidak siap. Bank tanah bisa menjadi solusi dengan memberikan kepastian lahan untuk kepentingan publik sekaligus mendorong target pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau bisa dipercepat dalam lima tahun, itu akan sangat baik,” pungkasnya.

Dalam pernyataannya, Anggota Komisi II DPR RI, Mardani



“Setahu saya, perangkat hukum terkait reformasi aset sudah sangat baik di Kementerian ATR/BPN. Ke depan, kita perlu mendorong agar kementerian ini mengoptimalkan pemanfaatan tanah, menjadi leading sector dalam grand design tata ruang, dan memastikan tanah dikelola untuk kesejahteraan rakyat.

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

Ali Sera menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan agenda reformasi

agraria, pengelolaan bank tanah, dan perencanaan tata ruang nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Nasir Djamil Soroti Praktik Mafia Pajak dan Tuntut Independensi Hakim Agung

Jakarta (09/09) — Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyoroti persoalan mafia pajak dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Hakim Agung di Senayan, Selasa (9/9/2025).

la menegaskan perlunya independensi hakim dalam mengawal kasus-kasus perpajakan yang menyangkut kepentingan bangsa.

Dalam forum resmi tersebut, Nasir menyinggung pengalaman calon Hakim Agung yang baru enam tahun menjabat sebagai hakim di Pengadilan Pajak. Menurutnya, rentang waktu itu relatif singkat sehingga potensi pengaruh dan bias dari Kementerian Keuangan masih bisa terjadi.

“Dibutuhkan independensi, sehingga tidak mudah diintervensi dalam kasus-kasus perpajakan. Pajak itu adalah jiwa bangsa, dan mafia pajak bisa mematikan jiwa bangsa,” ujar Nasir.

Nasir kemudian mengaitkan fenomena mafia pajak dengan teori kontrak sosial, yang

menurutnya memberi legitimasi kepada penguasa sekaligus mendorong terbentuknya masyarakat yang taat hukum. Namun, praktik mafia pajak justru merusak legitimasi tersebut.

la mencontohkan kasus Gayus Tambunan dan Rafael Alun Trisambodo sebagai bukti masih adanya aktor-aktor mafia pajak yang menimbulkan keraguan publik terhadap integritas sektor perpajakan.

“Masyarakat dulu dikejutkan oleh Gayus Tambunan, lalu belakangan Rafael Alun. Jangan-jangan masih banyak ‘Gayus’ lain di sana, hanya saja belum apes,” kata Nasir.

Politisi Fraksi PKS itu juga mempertanyakan potensi pajak nasional yang sesungguhnya. Menurutnya, jangan sampai pajak penerimaan pajak yang besar justru tidak tercatat

penuh karena sebagian menjadi bancakan mafia.

“Jangan-jangan sebenarnya kita punya potensi pajak 10, tapi hanya ditulis 3 atau 5, sementara sisanya jadi bancakan,” tegasnya.

Selain itu, Nasir menyoroti kebijakan tax amnesty yang menurutnya menunjukkan kegagalan negara dalam menggali potensi pajak secara optimal. Ia juga menyinggung praktik penghindaran pajak lewat penyimpanan dana di luar negeri seperti dalam Panama Papers.

Tak hanya di level nasional, persoalan perpajakan di daerah juga disorot. Ia mencontohkan banyak daerah kaya tambang justru tidak menikmati hasil pajak karena Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan terdaftar di Jakarta.

“Daerah hanya dapat ampasnya saja. Ini tidak adil bagi fiskal daerah,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Nasir menekankan tanggung jawab moral calon Hakim Agung dalam menjaga keadilan.

“Keputusan harus berdasarkan hukum dan keadilan, bukan sekadar aturan perundang-



“Keputusan harus berdasarkan hukum dan keadilan, bukan sekadar aturan perundang-undangan. Pajak bukan bikin bingung atau bikin bangkrut, tapi harus jadi instrumen menyejahterakan rakyat,”

Dr. H.M. NASIR DJAMIL, M.Si
Anggota Komisi III DPR RI

undangan. Pajak bukan bikin bingung atau bikin bangkrut, ta-

pi harus jadi instrumen menyejahterakan rakyat,” tutupnya.



image istimewa

Seleksi Hakim Agung, Adang Daradjatun Soroti Kualitas Wawancara Calon

Jakarta (08/09) — Anggota Fraksi PKS DPR RI, Adang Daradjatun, guna mendengarkan langsung penjelasan mengenai proses seleksi

yang telah dilaksanakan dalam menggelar rapat dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Mahkamah Agung (MA) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parle-

“Terus terang, dalam waktu yang singkat saya ingin menyampaikan secara pribadi. Tadi sudah diceritakan bagaimana kualitas kesehatan dan aspek lainnya. Namun, saya hanya ingin menggarisbawahi satu hal, yaitu proses wawancara terbuka.

Drs. H. ADANG DARADJATUN

Anggota Komisi III DPR RI

men, Senayan, Senin (8/9).

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam setiap tahapan seleksi. Menurutnya, kualitas wawancara terbuka menjadi salah satu aspek utama dalam menilai kelayakan para calon.

“Terus terang, dalam waktu yang singkat saya ingin menyampaikan secara pribadi. Tadi sudah diceritakan bagaimana kualitas kesehatan dan aspek lainnya. Namun, saya hanya ingin menggarisbawahi satu hal, yaitu proses wawancara terbuka. Dari wawancara itu dapat terlihat penerapan azas kenegarawanan, integritas, wawasan pengetahuan, kompetensi sidang, pengalaman, dan lain-lain,” ujar Adang.

la menambahkan, keterbukaan dalam penyampaian hasil wawancara kepada Komisi III sangat penting sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan siapa yang layak terpilih maupun tidak terpilih.

“Ini memungkinkan kami dalam proses wawancara menilai lebih objektif. Jadi, ketika ada yang terpilih atau tidak terpilih, kami memahami dasar pertimbangannya. Saya tahu persis kualitas wawancara itu sampai sejauh mana,” tegasnya.

Komisi III DPR RI berkomitmen untuk memastikan proses seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc berjalan secara profesional, akuntabel, serta mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum demi menjaga marwah lembaga peradilan di Indonesia.



image istimewa

Diversifikasi Pangan dan Irigasi Jadi Kunci, Slamet Minta Anggaran Kementan Lebih Terukur

Jakarta (08/09) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, drh. Slamet, menilai pagu indikatif Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2026 sebesar Rp40 triliun harus dijadikan momentum penting untuk memperkuat sektor pangan nasional.

Menurutnya, fokus anggaran tidak cukup hanya pada peningkatan produksi, tetapi harus diarahkan pada diversifikasi pangan berbasis lokal serta pembangunan infrastruktur irigasi yang efektif.

“Diversifikasi pangan harus menjadi arah pemba-

ngunan pertanian kita. Indonesia tidak boleh terus bergantung pada satu komoditas utama. Kita punya sorgum, singkong, sagu, dan berbagai pangan lokal lain yang potensial untuk dikembangkan,” ujar Slamet.

Ia menyoroti tingginya biaya pengembangan gandum per hektar dibandingkan sorgum, sehingga anggaran untuk pengembangan komoditas lokal idealnya minimal setara dengan alokasi pengembangan gandum. Slamet juga mengingatkan agar pengalangan cetak lahan jagung di NTT dan Papua, yang dinilai belum optimal, menjadi pelajaran berharga.

“Jangan sampai anggaran besar hanya menghasilkan lahan terbengkalai. Program cetak lahan harus benar-benar terukur dan memberikan dampak nyata bagi petani,” tegasnya.

Dalam aspek irigasi dan lahan, Slamet menyoroti alokasi

anggaran cetak sawah sebesar Rp8,75 triliun. Menurutnya, besarnya anggaran tersebut harus diimbangi dengan kepastian produktivitas lahan yang dihasilkan, bukan sekadar seremonial perluasan areal. Ia menekankan pentingnya integrasi perencanaan antara Ditjen Lahan dan Irigasi dengan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), agar tidak terjadi tumpang tindih program yang justru melemahkan efektivitas kebijakan.

“Penguatan pangan lokal yang ditopang dengan sistem irigasi yang dikelola secara serius akan menjadi fondasi kemandirian pangan Indonesia. Jika pangan lokal semakin kokoh dan irigasi semakin terkelola, maka produksi meningkat, petani lebih sejahtera, dan bangsa kita semakin percaya diri menghadapi tantangan pangan ke depan,” pungkasnya.

“Diversifikasi pangan harus menjadi arah pembangunan pertanian kita. Indonesia tidak boleh terus bergantung pada satu komoditas utama. Kita punya sorgum, singkong, sagu, dan berbagai pangan lokal lain yang potensial untuk dikembangkan,”

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI



Aleg PKS Rahmat Saleh Desak Bapanas Pastikan Anggaran Efektif untuk Ketahanan Pangan

Jakarta (04/09) --- Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut, anggota Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait efektivitas penggunaan anggaran, realisasi program pangan 2025, hingga isu terkini soal kenaikan harga beras.

Dalam rapat tersebut, Rahmat Saleh mengingatkan perlunya pengelolaan anggaran yang efektif agar program pangan nasional benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan justru tersedot habis pada biaya operasional dan manajemen.

"Kalau kita lihat, pada pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp233,2 miliar, justru

program dukungan manajemen mencapai 61,76% atau Rp144 miliar. Artinya, biaya operasional jauh lebih besar daripada program substansif. Kami ingin memastikan program Presiden Prabowo dalam ketahanan pangan benar-benar berjalan dengan baik, bukan tergerus untuk hal-hal yang tidak produktif," tegas Rahmat Saleh.

Selain efektivitas penggunaan anggaran, Rahmat juga menyoroti rendahnya realisasi anggaran pangan tahun 2025, khususnya pada program pengendalian kerawanan pangan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Ia mempertanyakan strategi Bapanas

agar sisa anggaran triliunan rupiah dapat terserap optimal dalam waktu yang singkat.

Rahmat juga mengkritisi minimnya alokasi anggaran penanganan bencana pangan. Ia mengutip data BNPB bahwa sepanjang 2025 tercatat 3.472 kejadian bencana alam. Namun alokasi anggaran untuk bantuan pangan saat bencana hanya Rp17,91 miliar.

Tak hanya anggaran, Rahmat menyinggung tren kenaikan harga beras yang terjadi secara serentak di berbagai daerah. Ia menekankan agar Bapanas segera mempercepat realisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Kita melihat harga beras premium, medium, dan sub medium justru berdekatan, bahkan nyaris tidak ada selisih. Ini anomali yang harus dijawab dengan strategi yang cepat dan tepat," jelasnya.

Pada akhir pandangannya, ia meminta penjelasan terkait isu disposal beras impor tahun-tahun sebelumnya agar tidak menimbulkan masalah ke depan. Ia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penguatan laboratorium keamanan pangan dan sarana pendukung, serta meminta kejelasan mengenai lokasi pembangunan 10 laboratorium baru yang diusulkan tahun 2026.



"Kita melihat harga beras premium, medium, dan sub medium justru berdekatan, bahkan nyaris tidak ada selisih. Ini anomali yang harus dijawab dengan strategi yang cepat dan tepat,"

H. RAHMAT SALEH,
S.Farm., M.IP
Anggota Komisi IV DPR RI



image istimewa

Abdul Hadi Tekankan Pentingnya Penyelesaian Tugas Pemerintah yang Melibatkan Masyarakat

Jakarta (04/09) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, menegaskan pentingnya penyelesaian seluruh program pemerintah secara tuntas dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (04/09).

Menurut Abdul Hadi, keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pemerintah

bukan hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.

“Selama ini kami juga tidak mengetahui adanya lucuran tambahan pada program yang disampaikan. Terima kasih Pimpinan dan Pak Menteri sudah menyampaikan hal itu. Dengan sisa waktu yang ada, kami menekankan agar penyelesaian tugas dari Pak Menteri ini bisa benar-benar kita tuntaskan,” ujar Abdul Hadi.

Legislator asal Fraksi PKS itu menekankan, program pembangunan infrastruktur maupun karya nyata pemerintah harus dijalankan secara partisipatif. Dengan demikian,

masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari proses pembangunan itu sendiri.

“Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya pada karya, ataupun yang melibatkan masyarakat, harus benar-benar dituntaskan. Dengan begitu manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat,” tambahnya.

Abdul Hadi menutup pernyataannya dengan ajakan agar pemerintah lebih konsisten dan transparan dalam melaksanakan program, sehingga keberhasilan pembangunan tidak hanya terukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari dampak nyata bagi masyarakat.

“Selama ini kami juga tidak mengetahui adanya lucuran tambahan pada program yang disampaikan. Terima kasih Pimpinan dan Pak Menteri sudah menyampaikan hal itu. Dengan sisa waktu yang ada, kami menekankan agar penyelesaian tugas dari Pak Menteri ini bisa benar-benar kita tuntaskan,”

ABDUL HADI, S.E., M.M.

Anggota Komisi V DPR RI



image istimewa

Rizal Bawazier Dorong Progres Koperasi Merah Putih dan Usulkan Pengetatan terhadap Koperasi Bermasalah

Jakarta (08/09) — Anggota DPR RI Komisi VI, Rizal Bawazier, meminta kejelasan terkait progres program Koperasi Merah Putih

serta mendorong adanya langkah tegas terhadap koperasi yang bermasalah. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama kementerian terkait,

koperasi yang dikelola dengan baik harus mendapat dukungan penuh, termasuk pemberian sertifikat resmi, sementara yang terbukti bermasalah tidak perlu diberikan bantuan. Koperasi-koperasi yang benar harus terus disupport, diberikan sertifikat, tapi kalau tidak benar ya jangan dibantu. Kalau dibiarkan, kasihan nanti bangsa yang jadi rugi,”

RIZAL BAWAZIER

Anggota Komisi VI DPR RI

Senin (8/9).

Rizal menilai hingga kini masih banyak permasalahan di lapangan, terutama terkait koperasi yang tidak berjalan sesuai aturan. Menurutnya, koperasi yang dikelola dengan baik harus mendapat dukungan penuh, termasuk pemberian sertifikat resmi, sementara yang terbukti bermasalah tidak perlu diberikan bantuan.

“Koperasi-koperasi yang benar harus terus disupport, diberikan sertifikat, tapi kalau tidak benar ya jangan dibantu. Kalau dibiarkan, kasihan nanti bangsa yang jadi rugi,” tegas Rizal.

Lebih lanjut, ia menyoroti keberadaan koperasi berbasis BMT (Baitul Maal wat Tamwil)

yang menurutnya rawan bermasalah. Ia meminta agar pemerintah menalok pengajuan izin atau bantuan untuk BMT yang tidak terbukti sehat secara operasional. “Kalau ada koperasi-koperasi BMT yang bermasalah, sebaiknya ditolak. Jangan sampai merugikan masyarakat,” ujarnya.

Terkait anggaran, Rizal juga menanyakan kejelasan dana yang dialokasikan untuk Koperasi Merah Putih, yang menurutnya perlu transparansi dan penjelasan lebih detail. Ia berharap dukungan anggaran tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki koperasi yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat.



Kopdes Merah Putih Berperan Penting Jadi Penggerak Pemerataan Ekonomi

Jakarta (08/09) – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari implementasi visi Astacita Presiden Prabowo.

Hal ini disampaikan dalam agenda sosialisasi yang digelar bersama Induk Keluarga Kossuma Indonesia.

Menurut Politisi Fraksi PKS ini, Koperasi Merah Putih merupakan wujud nyata Astacita poin ke-2 tentang mendorong kemandirian ekonomi dan poin ke-6 mengenai pembangunan dari desa dan dari bawah.

"Dengan basis di desa dan kelurahan, koperasi ini diharapkan menjadi penggerak pemerataan ekonomi sekaligus instrumen pemberantasan kemiskinan," ujar Nevi dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlemenaria, di Jakarta, Minggu (7/9/2025).

Legislator dari Dapil Sumbar II ini menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan penuh terhadap program ini. Beberapa pekan lalu, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK No. 63/2025 yang mengalokasikan pembiayaan sebesar Rp16 triliun dari SAL 2025 untuk mendukung KDMP dan KKMP. Nevi menilai langkah ini merupakan momentum besar untuk menguatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa.

"Kalau koperasi melemah, yang diuntungkan hanyalah oligarki dan kapitalisme. Sebaliknya, bila koperasi kuat, rakyatlah yang akan menikmati hasilnya," kutip Nevi mengingatkan pandangan Prof. Lukman Baga.

Meski demikian, ia turut memberi catatan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan. Ia menekankan pentingnya keberadaan tenaga akuntansi yang mumpuni agar pencatatan

keuangan koperasi dilakukan secara transparan dan sesuai standar.

"Tanpa akuntan yang kuat, risiko korupsi dan manipulasi di tingkat desa atau kelurahan bisa saja terjadi. Ini harus kita cegah sejak awal," tegasnya.

Nevi juga menambahkan bahwa hadirnya Koperasi Merah Putih akan membawa dampak luas: menciptakan lapangan kerja baru, menekan peran tengkulak, mengendalikan inflasi, hingga memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok.

"Momentum ini harus kita jaga bersama. Koperasi Merah Putih bukan hanya untuk kepentingan desa, tapi untuk kemajuan bangsa secara keseluruhan," pungkas Nevi Zuairina.

Hadirnya Koperasi Merah Putih akan membawa dampak luas: menciptakan lapangan kerja baru, menekan peran tengkulak, mengendalikan inflasi, hingga memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok. Momentum ini harus kita jaga bersama. Koperasi Merah Putih bukan hanya untuk kepentingan desa, tapi untuk kemajuan bangsa secara keseluruhan,"

Hj. NEVI ZUAIRINA
Anggota Komisi VI DPR RI



Alqassam Kasuba Minta Kementerian UMKM Fokuskan Anggaran Pada Program UMKM Naik Kelas

Jakarta (04/09) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyoroti komposisi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM dalam Rapat Kerja dengan Menteri UMKM serta Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/9).

Alqassam menyoroti 70% alokasi anggaran dari total pagu Rp 296,59 miliar terlalu fokus pada birokrasi dan belanja pemerintah, dibanding menyentuh langsung pelaku UMKM di lapangan.

“Sementara program langsung yang menyentuh UMKM hanya sekitar 27 persen. Komposisi seperti ini berisiko

menjadikan anggaran lebih banyak habis di birokrasi daripada untuk pemberdayaan UMKM,” tegas Alqassam.

Anggota Komisi VII ini turut menyoroti keterbatasan target program pemerintah, seperti penertiban NIB hanya 7.500 UMKM, sertifikasi produk baru 350 UMKM, dan digitalisasi usaha kecil yang baru

menyentuh 271 UMKM. Padahal, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 60 juta unit usaha.

“Sekurang-kurangnya 50% anggaran seharusnya menyentuh langsung pelaku usaha di lapangan. Selain itu, target program perlu diperluas, baik untuk sertifikasi, digitalisasi, maupun inkubasi usaha baru agar sesuai dengan kebutuhan nasional,” tegas Alqassam.

Lebih jauh, Alqassam mendorong agar pengawasan berbasis outcome diterapkan. Menurutnya, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari sejauh mana UMKM benar-benar naik kelas, omset meningkat, dan mampu menembus pasar ekspor.

“Gap ini menunjukkan adanya kendala pada birokrasi dan tata kelola keuangan. Program memang berjalan, tetapi pelaku di lapangan belum sepenuhnya menerima manfaat,” jelasnya.

Alqassam menutup pernyataannya dengan menekankan agar pemerintah lebih serius memperhatikan substansi pemberdayaan UMKM, bukan sekadar administrasi dan serapan anggaran semata.



“Sekurang-kurangnya 50% anggaran seharusnya menyentuh langsung pelaku usaha di lapangan. Selain itu, target program perlu diperluas, baik untuk sertifikasi, digitalisasi, maupun inkubasi usaha baru agar sesuai dengan kebutuhan nasional,”

**IZZUDDIN
ALQASSAM KASUBA**

Anggota Komisi VII DPR RI

PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kecatif Atrokratif Substantif

Parlementaria (Diskusi Publik,
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.



Aleg FPKS Alifudin Dorong Penambahan Anggaran untuk UMKM, Pendidikan, dan Penguatan Potensi Kalbar

Jakarta (03/09) – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Alifudin, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan anggaran di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar)

yang secara langsung menopang penguatan sektor UMKM, pendidikan vokasi, dan pengembangan potensi daerah, khususnya di Kalimantan Barat.

Dalam Rapat Kerja Komisi VII bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pariwisata, Alifudin menyampaikan bahwa penambahan anggaran harus diarahkan untuk memberikan dampak nyata, terutama bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

“Kami di Fraksi PKS konsisten mendukung setiap kebijakan anggaran yang pro-rakyat, apalagi yang langsung menyentuh UMKM. Kalimantan Barat memiliki potensi besar, tapi hingga kini belum mendapatkan dukungan maksimal, termasuk dalam sektor pariwisata. Karena itu, kami akan berjuang agar anggaran benar-benar ditingkatkan, bukan sekadar pergeseran,” tegas Alifudin.

Selain UMKM, Alifudin juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sesuai amanat konstitusi UUD 1945, yaitu minimal 20 persen dari APBN. Menurutnya,

pemotongan anggaran pada fungsi pendidikan tidak sejalan dengan kebutuhan lapangan, terutama di daerah pemilihannya, Kalimantan Barat.

“Saat kunjungan ke Polit-eknik, kami mendapati fakta bahwa anggaran pendidikan justru dikurangi. Ini kontraproduktif. Pendidikan vokasi harus diperkuat, bahkan kalau perlu ditambah politeknik baru di Kalimantan Barat. Saat ini yang

ada baru SMK, sementara politeknik belum tersedia. Padahal keberadaan politeknik sangat penting untuk menekan angka pengangguran,” jelasnya.

Alifudin menegaskan, Fraksi PKS akan terus mendorong peningkatan anggaran di dua kementerian tersebut, sepanjang benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM bangsa.

“Kami akan kawal secara komprehensif agar anggaran benar-benar efektif dan tepat sasaran. Kami ingin rakyat, terutama di Kalimantan Barat, merasakan langsung manfaat dari kebijakan ini,” pungkasnya.

“Kami di Fraksi PKS konsisten mendukung setiap kebijakan anggaran yang pro-rakyat, apalagi yang langsung menyentuh UMKM. Kalimantan Barat memiliki potensi besar, tapi hingga kini belum mendapatkan dukungan maksimal, termasuk dalam sektor pariwisata. Karena itu, kami akan berjuang agar anggaran benar-benar ditingkatkan, bukan sekadar pergeseran,



image istimewa

Diduga Mengandung Minyak Babi, BPJPH Harus Awasi Status Kehalalan Ompreng Program MBG

Jakarta (08/09) — Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar serius memastikan status kehalalan atau non halal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diketahui, beredar informasi, bahwa ompreng atau besek kecil berbahan seng yang digunakan untuk MBG belakangan meresahkan warga. Hal itu lantaran ompreng tersebut diduga diimpor dari China dan berbahan minyak babi.

Karena itu, ia juga mendesak agar BPOM segera menyelesaikan pengujiannya terhadap dugaan ompreng tersebut. Meskipun demikian, ia tetap mendukung Program MBG untuk mengatasi masalah bangsa seperti stunting dan kecukupan kebutuhan gizi anak bangsa.

"Namun pada pelaksanaannya jangan sampai timbul masalah, apalagi yang fundamental terkait status kehalalannya. Karenanya BPJPH sebagai otoritas terkait kehalalan juga harus ikut mengawal dari mulai pengujian hingga mengomunikasikan hasil penelitian terkait status kehalalannya ke masyarakat," ujar pria yang kerap disapa HNW ini dalam keterangan yang dikutip Parlemenaria, di Jakarta, Minggu (7/9/2025).

HNW menjelaskan dirinya kerap kali mendapatkan laporan beberapa kasus

bermasalah dalam pelaksanaan MBG, seperti siswa-siswa yang keracunan, makanan basi, anggaran paket makanan yang tidak sesuai dengan pagu yang ditetapkan, dan belakangan terkait ompreng MBG yang diduga mengandung minyak babi. Hal ini, tegasnya, tentu sangat meresahkan masyarakat umum yang mayoritas beragama Islam, baik yang menjadi penerima manfaat langsung dari MBG maupun tidak. Karena bila betul ompreng itu mengandung babi, maka jelas menghadirkan faktor yang diharamkan oleh Islam.

"Pada beberapa kunjungan Dapil, banyak juga warga yang menyampaikan keresahannya terkait fenomena ini. Apalagi MBG diberikan di sekolah yang jika rawan masalah, bahkan tidak halal, dikhawatirkan malah berdampak negatif pada anak-anak generasi penerus bangsa," ujar Anggota DPR-RI Dapil DKI Jakarta II ini.

Politisi Fraksi PKS ini pun mengapresiasi Komisi IX DPR yang pada rapat terakhir dengan BPOM (3/9) sudah

Diduga Mengandung Minyak Babi, BPJPH Harus Awasi Status Kehalalan Ompreng Program MBG

« SEBELUMNYA

memastikan bahwa B POM sedang melakukan pengujian terhadap ompreng MBG yang dipermasalahkan tersebut. HNW juga mengapresiasi B POM yang meminta agar BGN tidak dulu menggunakan jenis/produk ompreng yang sedang dalam

pengujian tersebut, sampai selesainya pengujian. Maka agar masalah ini segera selesai, B POM mestinya menyegerakan kajiannya dan bersama BPJPH mengumumkan hasilnya ke publik.

Dalam konteks kehalalannya, maka amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 menegaskan

bahwa BPJPH berwenang untuk melakukan pengawasan produk yang dikonsumsi warga Indonesia. Di Pasal 18 UU JPH tersebut jelas menyebutkan bahwa di antara yang diharamkan adalah produk dengan bahan yang berasal dari babi.

Jika hasil pengujian B POM menemukan bahwa ompreng MBG itu memang mengandung minyak babi, maka itu masuk kategori produk tidak halal, yang juga wajib dicantumkan keterangan tidak (non) halal pada produk itu sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat(2) UU JPH. Dan dengan status "non halal" maka ompreng itu tidak boleh digunakan pada penerima manfaat atau siswa yang muslim.

"Dan alangkah lebih baik dan produktif jika memang terbukti non halal, agar dihentikan penggunaannya, dan agar segera dicari penggantinya dari produk yang berbahan halal dan tidak melibatkan unsur yang haram, dan itu sangat banyak jenisnya dan mudah dicarinya. Itu semua selain untuk memenuhi hak asasi konsumen, juga agar segera dapat menghilangkan keresahan masyarakat yang bila terus dibiarkan akan bisa menghilangkan kepercayaan publik dan bisa berpotensi menggagalkan program Presiden Prabowo yang padahal bisa bermanfaat untuk rakyat," pungkasnya.



"Pada beberapa kunjungan Dapil, banyak juga warga yang menyampaikan keresahannya terkait fenomena ini. Apalagi MBG diberikan di sekolah yang jika rawan masalah, bahkan tidak halal, dikhawatirkan malah berdampak negatif pada anak-anak generasi penerus bangsa,"

**Dr. H.M. HIDAYAT
NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI



Aleg PKS Netty: BPOM Jangan Lengah Jalankan Fungsi Pengawasan

Jakarta (03/09) – Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jawa Barat yang juga anggota Komisi IX, Netty Prasetyani, menegaskan bahwa anggaran adalah instrumen penting, bahkan ideologis, dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa.

Dalam konteks pengawasan obat dan makanan, ia menilai capaian kinerja Badan POM masih menunjukkan tanda bahaya.

“Kembali Pak, bahwa anggaran adalah instrumen, bahkan boleh kita katakan menjadi salah satu instrumen ideologis bagi kita untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Dalam konteks pengawasan obat dan makanan, maka kalau kita melihat bagaimana Bapak membuat angka 87% dengan angka sebagai indikator, ini sebenarnya tanda bahaya Pak buat kita semua,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Kepala Badan POM, Selasa (03/09).

Anggota Komisi IX FPKS tersebut menekankan bahwa risiko kesehatan, ekonomi, per-

dagangan, hingga kepercayaan publik merupakan ancaman nyata. Ia menilai Badan POM, meski bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai Perpres Nomor 80 Tahun 2017, belum memiliki kekuatan penuh dalam melaksanakan tugas pokoknya.

“Enggak punya power, enggak punya kekuatan. Padahal kita ini berhadapan dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta. Kemudian juga gaya hidup masyarakat yang seringkali saya ulang-ulang Pak, masyarakat itu selalu mencari produk-produk yang terjangkau dengan kantongnya, produk-produk yang murah, produk-produk yang mudah didapatkan,” tegas legislator asal Jawa Barat itu.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengkritisi capaian program Badan POM yang masih rendah. Menurutnya, peningkatan pengetahuan masyarakat baru 32 persen, layanan informasi 66 persen, dan fasilitator pemberdayaan hanya 23,5 persen.

“Ya terus kita mau berharap diapresiasi seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat Bapak kemudian mengusulkan tambahan anggaran, kok saya agak terusik ya Pak, kenapa? Karena justru di sini dukungan manajemennya ini besar Pak, padahal fungsi pengawasan dan penindakan sekali lagi menjadi ruh dan DNA dari Badan POM,” jelasnya.

Politisi PKS tersebut juga mempertanyakan penempatan anggaran program makan bergizi di Badan POM. Menurutnya, hal itu berpotensi mengaburkan fokus lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi utama pengawasan obat dan makanan.

“Kenapa kemudian anggarannya juga diatur di Badan POM? Dengan tugas tambahan yang juga tidak kalah mulia, tapi harus kita luruskan ya, agar anggaran ini betul bisa digunakan sebesar-besarnya untuk melindungi rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Ia menegaskan, dengan pengawasan terhadap hampir 800 ribu produk, lebih dari 130 ribu izin edar, serta pangan olahan yang 55 persennya



“Kasian masyarakat kita kalau tidak mendapatkan pembinaan pendampingan dari tugas asasi Badan POM sebagai lembaga yang dibentuk oleh Presiden bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menjalankan fungsi pengawasan dan peredaran obat dan makanan,”

**Dr. Hj. NETTY
PRASETIYANI, M.Si**
Anggota Komisi IX DPR RI

berasal dari UMKM, maka Badan POM tidak boleh kehilangan orientasi.

“Kasian masyarakat kita kalau tidak mendapatkan pembinaan pendampingan dari tugas asasi Badan POM sebagai

lembaga yang dibentuk oleh Presiden bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menjalankan fungsi pengawasan dan peredaran obat dan makanan,” pungkasnya.



Achmad Ru'yat Soroti Ketiadaan Anggaran Kontrasepsi: Ironis, Resiko Kehamilan Tidak Diinginkan Bisa Meningkat

Jakarta (04/09) --- Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru'yat, menyoroti tidak adanya alokasi anggaran untuk alat dan obat kontrasepsi dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (04/09).

Ia mengingatkan bahwa tidak adanya dukungan anggaran alokan akan menimbulkan efek domino seperti kasus kehamilan tidak diinginkan yang berimplikasi serius terhadap kesehatan ibu dan anak.

"Terus terang dengan melihat anggaran yang ada, dari tahun 2021 sampai 2025 BKKBN meningkat, tetapi justru di tahun 2026 ini menurun. Anggaran untuk obat dan kontrasepsi tidak ada, jadi ini sangat ironis. Kalau alokan tidak tersedia, kemungkinan terjadi hamil yang tidak diinginkan akan meningkat," ujar Ru'yat.

Legislator PKS ini mengingatkan bahwa kehamilan tidak diinginkan bisa menimbulkan dampak domino, mulai dari kecemasan ibu, risiko bayi lahir tidak sehat, hingga meningkatnya angka kematian ibu dan bayi.

"Kalau hamil yang tidak diinginkan ini terjadi, ibu merasa cemas, ini berpengaruh terhadap kualitas anak. Ada kemungkinan aborsi tidak aman,

keguguran, bahkan meningkatnya angka kematian ibu dan bayi," tegas Achmad Ru'yat.

Selain itu, Ru'yat juga mengkritisi alokasi anggaran yang terlalu besar untuk program pendataan keluarga lima tahunan, yang mencapai Rp1,3 triliun. Menurutnya, dana sebesar itu sebaiknya dikolaborasi dengan kementerian

terkait agar lebih efisien.

"Kami mohon agar anggaran Rp1,3 triliun untuk pendataan keluarga bisa dikolaborasi dengan kementerian terkait, sehingga efisiensi tercapai dan anggaran bisa dikonsentrasikan kembali untuk alokan kontrasepsi," jelas Ru'yat.

Ia menegaskan, penguatan kelembagaan BKKBN yang kini setingkat kementerian seharusnya diikuti dengan peningkatan anggaran, bukan sebaliknya.

"Harusnya penguatan kelembagaan BKKBN diiringi dengan kenaikan anggaran, tapi justru terbalik. Kami minta agar anggaran untuk alat dan obat kontrasepsi ditingkatkan," pungkasnya.

"Terus terang dengan melihat anggaran yang ada, dari tahun 2021 sampai 2025 BKKBN meningkat, tetapi justru di tahun 2026 ini menurun. Anggaran untuk obat dan kontrasepsi tidak ada, jadi ini sangat ironis. Kalau alokan tidak tersedia, kemungkinan terjadi hamil yang tidak diinginkan akan meningkat,"

drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI



Muh Haris Soroti Kesenjangan Anggaran dan Kualitas Tata Kelola Program Makan Bergizi Nasional

Jakarta (08/09) — Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, menegaskan pentingnya strategi yang jelas dan transparan dalam menutupi kesenjangan anggaran sebesar Rp67 triliun dalam Program Makan Bergizi Nasional (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal ini disampaikan usai Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN di Senayan, Jakarta, Senin (8/9).

Muh Haris menyampaikan, alokasi RAPBN 2026 untuk BGN mencapai Rp268 triliun dengan target 82,9 juta penerima manfaat, namun kebutuhan riil sebesar Rp335 triliun. “Ada gap Rp67 triliun yang harus segera dicarikan solusinya. Pemerintah perlu memastikan strategi bridging yang konkret, baik melalui efisiensi, cost-sharing dengan pemerintah daerah, maupun mekanisme pembiayaan kreatif. Jangan sampai pelayanan gizi untuk anak-anak bangsa terpotong di tengah jalan,” tegasnya

Selain persoalan anggaran, Muh Haris juga menyoroti aspek kualitas gizi dan prioritas intervensi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Saat ini, alokasi untuk anak sekolah masih mendominasi 83,4%, sementara untuk ibu hamil, menyusui, dan balita hanya 10,1%. “Pada hal periode 1.000 HPK adalah kunci pencegahan stunting. BGN harus berani menaikkan persinya menjadi minimal 12-15% agar dampaknya signifikan,” jelasnya

Muh Haris juga menekankan pentingnya digitalisasi tata kelola MBG senilai Rp5,89 triliun agar benar-benar memberi manfaat. “Digitalisasi bukan

sekadar proyek, tapi harus menjamin transparansi, integritas pembayaran, dan akuntabilitas. SLA pembayaran harus maksimal tujuh hari, fraud rate di bawah 0,2%, serta adanya dashboard publik real-time agar masyarakat bisa ikut mengawasi,” ujarnya.

Terkait kesiapan lapangan, Muh Haris meminta BGN memastikan kapasitas dapur umum, cold chain, dan SDM gizi benar-benar siap mendukung lonjakan 30.000 Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) hingga akhir 2025. “Program ini jangan sampai terganjal bottleneck di lapangan. Keterlambatan distribusi atau lemahnya pengawasan bisa berakibat fatal, apalagi sudah ada kasus keracunan dan isu halal yang meruntuhkan kepercayaan publik,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Muh Haris menegaskan bahwa Fraksi PKS mendukung penuh akselerasi program Makan Bergizi Nasional sebagai investasi strategis untuk menurunkan



Kami ingin memastikan program ini berjalan sehat, halal, higienis, adil, dan bermanfaat bagi rakyat kecil. Jangan sampai ada anak yang keracunan, jangan ada UMKM yang dirugikan karena keterlambatan pembayaran.

Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.
Anggota Komisi IX DPR RI

stunting, meningkatkan konsistensi belajar, dan memperkuat ekonomi lokal melalui kemitraan UMKM. Namun, dukungan tersebut tetap disertai pengawasan ketat.

“Program makan bergizi gratis ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa. Kami

ingin memastikan program ini berjalan sehat, halal, higienis, adil, dan bermanfaat bagi rakyat kecil. Jangan sampai ada anak yang keracunan, jangan ada UMKM yang dirugikan karena keterlambatan pembayaran. Ini wujud nyata keberpihakan kita kepada rakyat,” pungkasnya.



image istimewa

Ingatkan Dampak Ekonomi Tersembunyi Pasca Kerusakan, Anggota Komisi XI DPR Amin Ak Dorong Penguatan Stabilitas Ekonomi Nasional

Jakarta (03/09) — Kerusakan yang terjadi baru-baru ini tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik dengan nilai sedikitnya mencapai Rp55 miliar. Menurut Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak adanya potensi bahaya tersembunyi pasca kerusakan yang biayanya jauh lebih besar ketimbang biaya pemulihan infrastruktur yang rusak.

Biaya mahal itu berupa penurunan reputasi Indonesia di mata dunia internasional yang kemudian juga berdampak pada pelemahan investasi dan juga peningkatan biaya utang negara.

"Nilah kerugian terbesar yang sering tidak terlihat, tetapi nyata dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih Indonesia sangat membutuhkan investasi dan peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) untuk mendongkrak kapasitas produksi dan membangkitkan industri nasional," bebernya.

Lebih lanjut Amin menjelaskan bahwa instabilitas sosial dan politik berpotensi menaikkan country risk premium, yang berarti investor meminta imbal hasil lebih tinggi untuk membeli Surat Utang Negara (SUN).

Sebagai ilustrasi, yield SUN 10 tahun pada periode stabil di akhir 2023 berada di sekitar 6,40%, namun ketika terjadi gejolak politik pada

2022 sempat melonjak hingga 7,80%.

"Selisih 1,4% tersebut tampak kecil, tetapi bila dikalikan dengan portofolio utang pemerintah yang mencapai ribuan triliun rupiah, maka tambahan biaya bunga yang harus ditanggung APBN menjadi sangat besar. Kondisi ini pada akhirnya juga membebani masyarakat sebagai pembayar pajak," jelasnya.

Selain itu, instabilitas juga berpotensi membuat investor menunda bahkan membatalkan rencana investasi. Laporan World Economic Outlook dari IMF menegaskan bahwa ketidakstabilan politik selalu menjadi risiko utama bagi prospek pertumbuhan negara berkembang.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun mencatat bahwa realisasi investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), kerap melambat

Ingatkan Dampak Ekonomi Tersembunyi Pasca Kerusakan, Anggota Komisi XI DPR Amin Ak Dorong Penguatan Stabilitas Ekonomi Nasional

« SEBELUMNYA

setelah gejala sosial terjadi.

“Kepercayaan investor adalah oksigen bagi pertumbuhan ekonomi, dan jika kepercayaan ini berkurang, maka ekonomi nasional akan kesulitan untuk bernafas,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS itu.

Ia pun berharap, indeks stabilitas politik Indonesia di mata Lembaga pemeringkat global tiak melorot. Saat ini Indonesia masih berada pada level BBB/stable, sebuah status

yang sangat berharga karena menurunkan biaya pendanaan negara maupun swasta.

Namun, jika reputasi ini menurun, maka biaya pendanaan global bagi Danantara, BUMN dan sektor swasta nasional otomatis akan meningkat, membuat daya saing ekonomi Indonesia semakin lemah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Amin mendorong pemerintah mengambil langkah strategis. Pertama, memperkuat komunikasi dengan investor global melalui roadshow dan

konferensi pers yang menyam-paikan langkah konkret pemulihan serta jaminan stabilitas.

Kedua, mempercepat reformasi struktural yang mendukung iklim usaha kondusif, kepastian hukum, serta pemerataan pembangunan sehingga akar ketidakpuasan sosial dapat dikurangi.

Ketiga, mengoptimalkan instrumen fiskal dengan memperluas perlindungan sosial serta program padat karya guna menyerap tenaga kerja dan meredam gejala dari akar rumput.

Wakil rakyat dari Jatim IV itu pun memuji langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memulihkan kepercayaan publik dan merekatkan kembali kohesi sosial. Ia mengajak semua pihak menjadikan momentum ini sebagai kesempatan memperkuat fondasi stabilitas ekonomi nasional.

“Dengan stabilitas yang kokoh, Indonesia bisa melindungi kepentingan rakyat banyak dan mencegah munculnya ‘biaya tersembunyi’ yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, namun juga membebani generasi mendatang,” pungkasnya.



“Selisih 1,4% tersebut tampak kecil, tetapi bila dikalikan dengan portofolio utang pemerintah yang mencapai ribuan triliun rupiah, maka tambahan biaya bunga yang harus ditanggung APBN menjadi sangat besar. Kondisi ini pada akhirnya juga membebani masyarakat sebagai pembayar pajak,

AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI





Aleg PKS Junaidi Auly: BPH Migas Harus Jadi Penggerak Transisi Energi yang Adil dan Berkelanjutan

Jakarta (09/09) --- Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Junaidi Auly menyampaikan bahwa BPH Migas harus menjadi penggerak transisi energi yang adil dan berkelanjutan

Pandangan tersebut disampaikan setelah uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komite BPH Migas yang berlangsung kemarin pada hari Senin tanggal 8 September 2025. Menurutnya, titik kritis sektor hilir migas saat ini bukan sekadar pada ketersediaan dan distribusi energi fosil, melainkan pada kemampuan BPH Migas untuk menyelesaikan fungsi teknisnya dengan agenda besar transisi energi nasional.

"Selama ini kebijakan hilir masih berat pada energi fosil. Jika tidak ada perubahan, Indonesia berisiko semakin tertinggal dari tren global menuju energi bersih dan makin bergantung pada impor minyak. Komite BPH Migas yang baru harus berani melakukan

terobosan agar distribusi energi ke depan juga membuka ruang bagi pemanfaatan biofuel, gas, maupun LNG skala kecil," jelas Junaidi selaku Anggota Komisi XII DPR RI.

Ia menegaskan bahwa arah kinerja komite yang baru harus dibingkai dalam visi yang jelas, seperti tercermin dalam tagline "Menjamin energi berkelanjutan yang adil, efisien, dan transparan bagi ketahanan bangsa".

Lebih lanjut, Junaidi menekankan pentingnya peran DPR dalam mengawal sektor hilir migas.

"Parlemen akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan BPH Migas bekerja sesuai mandat undang-undang. Kami ingin memasti-

kan setiap kebijakan hilir benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. DPR akan menjadi mitra kritis sekaligus pengingat agar transisi energi dilakukan dengan transparan, berkeadilan, dan tidak membebani masyarakat kecil," tegas Anggota DPR RI F-PKS dari Dapil Lampung tersebut.

Menutup pandangannya, Junaidi menyampaikan harapan agar anggota komite terpilih dapat benar-benar menghadirkan kebijakan hilir yang adaptif, berorientasi ke depan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

"BPH Migas harus bertransformasi menjadi penggerak utama yang mampu mendukung terwujudnya transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan, tanpa meninggalkan mandat utamanya sebagai pengawas distribusi energi fosil," pungkasnya.



"BPH Migas harus bertransformasi menjadi penggerak utama yang mampu mendukung terwujudnya transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan, tanpa meninggalkan mandat utamanya sebagai pengawas distribusi energi fosil,"

Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XII DPR RI



Live
Interactive
Bersama
Anggota
Legislatif PKS



BERSAMA **M. ADRIAN RASHAD**



Saksikan
Setiap Jum'at
pk. 13.30 s.d 14.30 WIB



image istimewa

Legislator PKS Jalal Abdul Nasir Tekan Digitalisasi Pengawasan Lingkungan untuk Tanggulangi Bencana

Jakarta (04/09) — Komisi XII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.

Dalam rapat tersebut, anggota Fraksi PKS, Jalal Abdul, menyoroti urgensi peningkatan mitigasi bencana akibat perubahan iklim serta digitalisasi pengawasan lingkungan.

Jalal menekankan bahwa

“Menurut data internasional, separuh bencana disebabkan oleh perubahan iklim. Pertanyaannya, apakah alokasi Rp58,79 miliar sudah mencerminkan kebutuhan mitigasi yang memadai? Karena ke depan intensitas bencana bisa semakin meningkat. Saya kira masih ada waktu untuk mereview kembali agar mitigasinya lebih kuat,

H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.

Anggota Komisi XII DPR RI

perubahan iklim sudah menjadi faktor utama penyebab bencana di dunia.

“Menurut data internasional, separuh bencana disebabkan oleh perubahan iklim. Pertanyaannya, apakah alokasi Rp58,79 miliar sudah mencerminkan kebutuhan mitigasi yang memadai? Karena ke depan intensitas bencana bisa semakin meningkat. Saya kira masih ada waktu untuk mereview kembali agar mitigasinya lebih kuat,” ujarnya.

Selain itu, Jalal juga mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup semakin serius memperkuat sistem digitalisasi dalam pengawasan lingkungan, khususnya terkait pencemaran sungai yang banyak dikeluhkan masyarakat.

“Di berbagai pertemuan dengan masyarakat, termasuk di Bekasi, saya sering menerima laporan pencemaran sungai. Kalau pengawasan berbasis digital bisa berjalan real-time, maka setiap pencemaran bisa langsung terdeteksi dan ditindaklanjuti. Kita bisa tahu pencemaran apa, di mana, dan siapa yang bertanggung jawab. Dengan begitu, kesadaran masyarakat dan dunia usaha juga meningkat karena pengawasan makin ketat,” tegasnya.

Jalal menegaskan, Fraksi PKS akan terus mengawal kebijakan lingkungan agar anggaran negara tidak hanya formalitas di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan alam.



image istimewa

Ateng Sutisna Dorong Industri Sawit Terapkan TNFD & IFRS S2: Transparansi Global untuk Hentikan Deforestasi Masif

Jakarta (29/08) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menyampaikan pernyataan Menteri Lingkungan Hidup yang menyarankan masifnya konversi hutan menjadi kebun sawit.

Menurut Ateng, langkah korektif bagi industri sawit tidak cukup berhenti pada sertifikasi ISPO maupun RSPO saja, melainkan harus melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan pelaporan berbasis Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD-nature) dan International Financial Reporting Standard Sustainability 2 (IFRS-Climate S2).

“Aturan sertifikasi seperti ISPO dan RSPO memang penting untuk memastikan terjadinya perjalanan di tingkat operasional. Tetapi tantangannya saat ini adalah transparansi risiko finansial dan keterbukaan terkait dampak lingkungan. Di sini pelaporan TNFD dan IFRS S2 berperan melengkapi — agar dunia usaha tidak hanya patuh, tetapi juga akuntabel secara global,” tegas Ateng.

Ia menjelaskan bahwa ISPO adalah regulasi nasional dan RSPO yang bersifat sukarela pada tingkat global memang menilai kegiatan operasional di luar negeri. Namun, penerapan TNFD dan IFRS S2 menambahkan lapisan keterbukaan finansial dan analisis risiko yang lebih mengikat, termasuk

keajiban untuk bergantung pada lokasi, target restorasi, dan skenario transisi. Dengan kombinasi itu, perusahaan sawit akan memiliki kapasitas lebih besar untuk mencegah konversi hutan secara masif sekaligus menjamin pemenuhan sertifikasi dengan eksposur finansial nyata.

Ateng mengingatkan bahwa data terbaru menunjukkan tren deforestasi yang kembali meningkat akibat ekspansi sawit. Sertifikasi seperti RSPO maupun ISPO memang terbukti dapat menekan laju deforestasi bila diterapkan secara konsisten dengan pengawasan independen, namun efektivitasnya masih bervariasi. Dalam konteks ini, pelaporan TNFD dan IFRS S2 dapat berfungsi sebagai mekanisme verifikasi tambahan sekaligus akuntabilitas yang lebih kuat bagi perusahaan.

Lebih jauh lagi, Ateng menekankan bahwa laporan berbasis TNFD dan IFRS S2 juga akan menjadi instrumen penting bagi lembaga keuangan dan investor. Informasi yang

Ateng Sutisna Dorong Industri Sawit Terapkan TNFD & IFRS S2: Transparansi Global untuk Hentikan Deforestasi Masif

« SEBELUMNYA

transparan memungkinkan bank menilai risiko kredit dan portofolio yang terkait dengan deforestasi, sehingga hanya perusahaan yang benar-benar menjaga prinsip nol-konversi yang akan memperoleh pembiayaan lebih menguntungkan. Sementara bagi perusahaan sawit itu sendiri, pelaporan TNFD dan IFRS S2 akan membantu mengelola risiko

operasional, memprioritaskan pemulihan program, serta memperkuat reputasi dan akses ke pasar ekspor yang semakin ketat menuntut bukti keberadaannya.

Menurut Ateng, pemerintah dan regulator juga memiliki peran penting untuk menyinkronkan standar ISPO dengan prinsip-prinsip TNFD dan IFRS S2, misalnya dalam pengungkapan lokasi, target konservasi, serta memperkuat

mekanisme pengawasan independen. Sementara itu, lembaga keuangan dan konsumen internasional diharapkan menerapkan uji tuntas berbasis pelaporan tersebut sebagai persyaratan pembiayaan dan pembelian, serta memberikan insentif harga dan akses pasar bagi praktik nol-konversi.

“Kalau kita bicara melampaui inovasi, maka sawit Indonesia harus bertransformasi. Tidak cukup hanya ISPO atau RSPO, tetapi juga harus menjawab standar transparansi global melalui TNFD dan IFRS S2. Dengan begitu, kita bisa menjaga ekonomi sawit tetap tumbuh tanpa harus menyumbangkan hutan dan keanekaragaman hayati bangsa,” pungkas Ateng.



image istimewa



“Aturan sertifikasi seperti ISPO dan RSPO memang penting untuk memastikan terjadinya perjalanan di tingkat operasional. Tetapi tantangannya saat ini adalah transparansi risiko finansial dan keterbukaan terkait dampak lingkungan. Di sini pelaporan TNFD dan IFRS S2 berperan melengkapi — agar dunia usaha tidak hanya patuh, tetapi juga akuntabel secara global,”

Ir. H. ATENG SUTISNA

Anggota Komisi XII DPR RI



image istimewa

Soroti Kandidat Anggota Komite BPH Migas, Aleg PKS Meitri Tekankan Pentingnya Aspek Integritas dan Inovasi Kebijakan

Jakarta (08/09) --- Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menekankan pentingnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dikelola oleh figur yang berintegritas dan memiliki kapasitas manajerial dan teknis yang mumpuni

Demikian hal itu diungkapkan Meitri usai menghadiri uji kelayakan dan kepatutan kandidat anggota komite BPH Migas masa jabatan tahun 2025-2029 oleh Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (8/9/2025).

"BPH Migas sebagai lembaga yang turut mengatur hajat hidup orang banyak di bidang energi membutuhkan figur pemimpin yang memegang teguh nilai integritas. Taat pada hukum, transparan dalam mengambil keputusan, bersih dari konflik kepentingan, serta berani menolak setiap bentuk penyimpangan dalam tata kelola energi. Integritas menjadi fondasi agar fungsi BPH Migas tidak hanya berjalan formal atau _business as usual_, tetapi hadir sebagai representasi negara yang bersungguh-sungguh melayani kepentingan rakyat," jelas Meitri.

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menyatakan, tantangan yang dihadapi BPH Migas ke depan dinilai tidak ringan. Meitri mengungkapkan di antara sejumlah isu yang masih menjadi perhatian bersama BPH Migas dan Komisi XII DPR

RI di antaranya soal subsidi energi yang masih rawan salah sasaran, keterbatasan infrastruktur di wilayah 3T, ketergantungan pada impor, serta disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi.

"Sejumlah tantangan ini menuntut adanya terobosan kebijakan pengawasan yang lebih ketat dan inovatif. Untuk itu, Komisi XII DPR RI berharap agar Anggota Komite BPH Migas terpilih periode mendatang tidak hanya menjalankan fungsi rutin, tetapi juga mampu melahirkan langkah-langkah strategis yang berdampak nyata," ucapnya.

Pada kepemimpinan mendatang, Meitri meminta agar BPH menaruh atensi serius pada kebijakan digitalisasi. Dia mendorong agar BPH Migas segera melakukan digitalisasi penuh terhadap sistem distribusi BBM dan gas bumi dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemanfaatan integrasi data lintas lembaga, serta penggunaan kecerdasan

Soroti Kandidat Anggota Komite BPH Migas, Aleg PKS Meitri Tekankan Pentingnya Aspek Integritas dan Inovasi Kebijakan

« SEBELUMNYA

buatan untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran sekaligus menekan potensi penyalahgunaan.

“Selama ini, hampir 30 persen subsidi dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. Untuk itu, kehadiran Data

Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai gugus data tunggal yang baru milik pemerintah, perlu dimaksimalkan sebagai salah satu instrumen pengawasan. Dengan integrasi data sosial-ekonomi yang komprehensif, BPH Migas dapat memastikan bahwa subsidi BBM dan gas benar-benar sampai



pada kelompok masyarakat yang berhak,” jelasnya.

Secara praktik, lanjut Meitri menjelaskan, subsidi tidak lagi berbasis komoditas yang berlaku umum, melainkan berbasis penerima manfaat. Melalui integrasi NIK atau QR code di SPBU, pembeli dapat diverifikasi secara real time sehingga hanya keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan harga subsidi, sementara konsumen lain membayar harga keekonomian.

“Cara ini diyakini lebih adil, efisien, dan memperkuat fungsi pengawasan BPH Migas sebagaimana diamanatkan undang-undang,” tambahnya.

Untuk memperkuat fungsi pengawasan, Meitri juga meminta agar anggota komite BPH Migas terpilih dapat secara konsisten memelihara hubungan baik dan kolaborasi dengan Komisi XII DPR RI.

“Kerja sama baik yang sudah ada perlu dilanjutkan. Sebagai lembaga negara yang sama-sama menjalankan fungsi pengawasan, BPH Migas dan Komisi XII DPR sudah sepatutnya dapat bersinergi dalam memastikan kebijakan energi dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kolaborasi yang erat inilah yang akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung perwujudan visi swasembada energi,” pungkasnya.



“Sejumlah tantangan ini menuntut adanya terobosan kebijakan pengawasan yang lebih ketat dan inovatif. Untuk itu, Komisi XII DPR RI berharap agar Anggota Komite BPH Migas terpilih periode mendatang tidak hanya menjalankan fungsi rutin, tetapi juga mampu melahirkan langkah-langkah strategis yang berdampak nyata,”

**Hj. MEITRI CITRA
WARDANI, S.H.**

Anggota Komisi XII DPR RI



Usai Kunjungi Korban Pasca
Unjuk Rasa,

Meity Rahmatia Harap Warga Sulsel Saling Menjaga dan Mengasihi

Makassar (08/09) – Situasi Kota Makassar kini kembali normal. Jalan-jalan tampak ramai seperti biasa, menunjukkan aktivitas ekonomi dan sosial warga Makassar yang padat. Pada Jumat 29 Agustus 2025, unjuk rasa sempat membekukan semua rutinitas ini.

Terutama di tiga jalan utama, yaitu Jalan Sultan Alauddin, Jalan Andi Pangerang Pettarani dan Jalan Jenderal Urip Sumiharto djo. Mahasiswa dan ojek online turun ke jalan, memberikan atensi dan memprotes meninggalnya Affan Kurniawan di Jakarta akibat dilindas mobil Barakuda Polisi. Unjuk rasa yang semula damai ini berakibat rusuh. Massa kemudian membakar Gedung DPRD Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa ini, 3 orang dinyatakan meninggal

terjebak api di DPRD Makassar dan beberapa lainnya dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar yang cukup parah. Peristiwa ini benar-benar menyisakan duka mendalam.

Banyak pihak yang tak menyangka, di Makassar yang menjunjung tinggi budaya siri, sipakalebbi, sipakatawa dan sipakalinge, peristiwa tragis ini terjadi.

"Saya sangat terpukul menyaksikan peristiwa tragis ini, saya menangis terjadi di kampung halaman saya. Masyarakat Bugis-Makassar dikenal sa-

ngat menjunjung budaya saling mengingatkan dan menghargai satu dengan lainnya," ungkap akun Petta Rukka Daeng Gora di laman Facebook, seorang Warga Makassar yang bertemu di Australia.

Tak lama setelah kejadian, alumni Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin itu bahkan sempat membuat siaran live, mengulas khusus peristiwa memilukan tersebut. Hal tersebut juga turut dirasakan dan menjadi sorotan Anggota DPR RI dari Sulawesi Selatan, Hj. Meity Rahmatia. Ia mengaku sedih atas peristiwa pada Jumat lalu itu. Sebagai perwakilan rakyat dari Sulsel, ia menyampaikan belasungkawa yang dalam kepada keluarga korban.

"Saya menyampaikan duka mendalam kepada semua korban. Semoga ke depan tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Kita masyarakat Sulsel memiliki rasa sipakalebbi, sipakainge, sipakatawa. Budaya ini kita kedepankan, rasa saling mengasihi dan menyanangi sesama masyarakat Bugis, Makassar dan Sulsel umumnya. Tujuannya agar tidak ada korban jiwa seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kasihan keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan," jelasnya.

Meity pada pekan ini menjenguk sejumlah keluarga korban di Makassar. Dalam kunjungannya tersebut, ia menyampaikan rasa duka secara lang-



"Saya sangat terpukul menyaksikan peristiwa tragis ini, saya menangis terjadi di kampung halaman saya. Masyarakat Bugis-Makassar dikenal sangat menjunjung budaya saling mengingatkan dan menghargai satu dengan lainnya,

**Hj. MEITY RAHMATIA,
S.Pd., S.E., M.M.**

Anggota Komisi XIII DPR RI

sung. Ia juga mendukung upaya rehabilitasi korban pasca unjuk rasa yang dilakukan pemerintah. Tak hanya yang meninggal tapi juga yang sedang dalam perawatan intensif di rumah sakit. Dan sebagai perwakilan masyarakat Sulsel di Komisi Tiga Belas, ia juga meminta Komnas HAM dan LPSK tetap

memperhatikan hak-hak dan perlindungan bagi sejumlah pengunjuk rasa yang ditahan di kepolisian saat ini.

"Hak-hak sebagai warga negara tetap diperhatikan agar mereka mendapat menjalani proses pemeriksaan dengan adil," harapnya.



**Follow
Akun tiktok
Fraksi PKS DPR RI**

@fraksipksdprri



image istimewa

Pembahasan RUU PPRT, Reni Astuti Dorong Strategi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Jakarta (08/09) — Anggota DPR RI, Reni Astuti, menekankan pentingnya strategi pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rumah tangga (PRT), terutama perempuan yang mayoritas mengisi sektor ini.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, Senin (8/9).

Reni mengingatkan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang ditargetkan rampung

tahun ini harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam implementasi di lapangan. "Jangan sampai RUU selesai, tapi pemerintah belum menyiapkan strategi perlindungan sosialnya," tegasnya.

Menurutnya, pekerja rumah tangga merupakan kelompok rentan yang kerap mengalami kekerasan. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas dan keterampilan, hingga sistem pengaduan yang bisa diakses jika terjadi kasus. Ia juga mendorong agar peran pemerintah daerah diperjelas dalam mekanisme perlindungan ini.

Reni turut menyoroti data yang dipaparkan BPJS Kesehatan terkait klasifikasi PRT dalam

Pekerja rumah tangga merupakan kelompok rentan yang kerap mengalami kekerasan. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas dan keterampilan, hingga sistem pengaduan yang bisa diakses jika terjadi kasus. Ia juga mendorong agar peran pemerintah daerah diperjelas dalam mekanisme perlindungan ini.

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Badan Legislasi DPR RI

kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun non-PBI. Ia mempertanyakan kejelasan definisi "pemberi kerja" dalam konteks pekerja rumah tangga. "Apakah pemberi kerja PRT akan disamakan dengan pemberi kerja di sektor formal lainnya? Ini harus jelas agar perlindungan dan skema pembiayaan juga jelas," ujarnya.

Ia menekankan, perlindungan bagi PRT tidak hanya soal regulasi, tetapi juga keberpihakan nyata dalam kebijakan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan. "Kita harus hadir melindungi mereka secara utuh, agar pekerja rumah tangga mendapat pengakuan, perlindungan, dan kesejahteraan yang layak," pungkas Reni.

Fraksi PKS Dorong Evaluasi Prolegnas 2025 dan Usulkan Tambahan RUU Prioritas

Jakarta (09/09) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 perlu dievaluasi serius agar target penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) dapat lebih produktif.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Baleb dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah dalam rapat Badan Legislasi (Baleb) DPR RI, Selasa (9/9/2025) di Ruang Rapat Baleb, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan.

Fraksi PKS mencatat masih terdapat 27 RUU yang berada pada tahap penyusunan, padahal tahun 2025 tinggal beberapa bulan. Selain itu, terdapat sejumlah RUU yang sudah masuk kategori carry over dari periode sebelumnya, namun hingga kini belum juga dibahas.

“Padahal namanya carry over itu seharusnya dipercepat pembahasannya. Bahkan ada RUU yang sudah selesai di Baleb, seperti RUU Koperasi dan RUU Statistik, tetapi belum

juga dipapornakan menjadi inisiatif DPR,” ungkap Ledia.

PKS menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi bersama untuk melihat persoalan mendasar yang menghambat produktivitas legislasi. Selain itu, fraksi tersebut juga menyampaikan usulan agar sejumlah RUU penting dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2025, yaitu RUU Perampasan Aset, RUU tentang Kamar Dagang dan Industri, serta RUU tentang Kawasan Industri.

Ledia juga menyoroti urgensi RUU terkait pekerja berbasis platform digital seperti ojek online, yang saat ini relevan dengan perkembangan ketenagakerjaan.

“Harus dipastikan jangan sampai ada tumpang tindih

dengan RUU Ketenagakerjaan yang tengah disusun Komisi IX. Sinergi sangat penting agar hasil regulasi tidak kontradiktif,” tambahnya.

Lebih lanjut, PKS mengingatkannya agar DPR bersama pemerintah melakukan pemetaan ulang terhadap 27 RUU yang masih dalam tahap penyusunan. Jika ada RUU yang sulit diselesaikan tahun ini, sebaiknya dialihkan ke Prolegnas 2026 dengan catatan telah memenuhi syarat, yakni memiliki draf dan naskah akademik.

Selain itu, Fraksi PKS juga menekankan pentingnya membahas RUU Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di awal 2026, karena dinilai sangat strategis dalam memperkuat perekonomian daerah.

“Dengan evaluasi ini, kita berharap Prolegnas bisa lebih produktif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat,” pungkask Sekretaris Fraksi PKS tersebut.



Fraksi PKS mencatat masih terdapat 27 RUU yang berada pada tahap penyusunan, padahal tahun 2025 tinggal beberapa bulan. Selain itu, terdapat sejumlah RUU yang sudah masuk kategori carry over dari periode sebelumnya, namun hingga kini belum juga dibahas.

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T
Anggota Badan Legislasi DPR RI

Nevi Zuairina Dorong Pembangunan Infrastruktur Hijau Lewat IPAL Domestik di Agam

Agam (06/09) — Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina, kembali hadir di tengah masyarakat Sumatera Barat dalam kegiatan Sosialisasi Infrastruktur Hijau yang digelar di Balairung Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung.

Acara ini terselenggara atas kerja sama DPR RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dengan fokus utama membahas pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik.

Dalam sambutannya, Hj. Nevi menegaskan bahwa pembangunan IPAL merupakan langkah konkret untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat.

Menurutnya, limbah domestik dari aktivitas rumah tangga sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan buang air kerap dianggap sepele, padahal dampaknya terhadap pencemaran lingkungan sangat serius.

“Jika air limbah tidak dikelola dengan baik, ia bisa mencemari sungai, merusak ekosistem, bahkan membahayakan kesehatan masyarakat. Penyakit seperti diare, kolera, hepatitis A, hingga demam berdarah sering kali berawal dari sanitasi yang buruk,” ungkap anggota Komisi VI DPR RI.

Berdasarkan data Grinviro Biotekno Indonesia, sekitar 50% limbah rumah tangga di Indonesia masih dibuang ke saluran terbuka. Di wilayah perkotaan, seperti DKI Jakarta, angkanya bahkan mencapai hampir 80%. Kondisi ini memperburuk kualitas air, mengurangi kandungan oksigen, serta mengancam flora-fauna perairan.

Hj. Nevi menyebut bahwa IPAL domestik bukan hanya sekadar proyek fisik, melainkan simbol dari infrastruktur hijau, pembangunan yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa pembangunan IPAL harus dibarengi dengan partisipasi aktif masyarakat, mulai dari pemahaman fungsi, pemeliharaan, hingga manfaat jangka panjangnya.

“Kebijakan infrastruktur hijau tidak akan berjalan tanpa gerakan sosial. Kita butuh gotong royong masyarakat, dukungan pemerintah, kontribusi akademisi, dan juga peran swasta. Bersama-sama kita bisa membangun budaya bersih, peduli lingkungan, dan sanitasi sehat,” tambahnya.

Politisi PKS asal Sumatera Barat II ini juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Agam yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran warga menunjukkan kesadaran kolektif bahwa lingkungan yang sehat adalah hak semua orang sekaligus



“Jika air limbah tidak dikelola dengan baik, ia bisa mencemari sungai, merusak ekosistem, bahkan membahayakan kesehatan masyarakat. Penyakit seperti diare, kolera, hepatitis A, hingga demam berdarah sering kali berawal dari sanitasi yang buruk,”

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat II

tanggung jawab bersama.

“Dengan IPAL domestik, kita tidak hanya melindungi lingkungan hari ini, tapi juga

mewariskan masa depan yang lebih sehat dan bermartabat bagi anak cucu kita,” pungkasan Nevi Zuairina.



image istimewa

Hadir di Musda VI PKS Lumajang, Amin Ak Tekankan Politisi Harus Bermanfaat bagi Rakyat

Lumajang (07/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jawa Timur IV, Amin Ak, menyerukan pentingnya politisi yang berorientasi pada kemanfaatan rakyat. Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya pada acara Musyawarah Daerah (Musda) VI PKS Kabupaten Lumajang, Ahad (7/9/2025).

Dalam pidatonya, Amin mengutip prinsip khairunnas anfa'uhum linnas yang berarti sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Ia menegaskan, jika politisi berangkat dari prinsip ini, maka jabatan publik bukan sekadar kedudukan, melainkan sarana untuk menghadirkan manfaat yang luas bagi masyarakat.

"Melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, dukungan anggaran untuk kesejahteraan rakyat menjadi sangat penting dan strategis," ungkapnya.

Menurut Amin, orientasi kebijakan publik harus diwujudkan dalam program nyata yang menyentuh kehidupan rakyat kecil, bukan sekadar wacana politik.

Amin menjelaskan, kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan jika negara mampu menjamin empat kebutuhan dasar yakni pangan, pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan atau mata pencaharian.

"Jika empat hal ini bisa

dijamin negara, maka masyarakat tidak hanya sejahtera tetapi juga berdaya," ujarnya.

Ia menambahkan, PKS di berbagai tingkatan selalu memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, baik melalui regulasi maupun alokasi anggaran.

Lebih jauh, Amin menekankan pentingnya nilai-nilai Islam sebagai dasar perjuangan politik. Menurutnya, dalam konsep syumuliyatul Islam atau kesempurnaan ajaran Islam, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan sarana menghadirkan masalah bagi umat.

"Menjadi pejabat publik itu bukan tujuan, melainkan jalan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi hajat hidup orang banyak," tegasnya.

Ia menekankan bahwa Islam mengajarkan tanggung jawab moral bagi politisi untuk memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan

Hadir di Musda VI PKS Lumajang, Amin Ak Tekankan Politisi Harus Bermanfaat bagi Rakyat

« SEBELUMNYA

keberpihakan pada rakyat.

Di hadapan kader PKS Lumajang, Amin berpesan untuk memperkuat tiga modal utama partai, yaitu militansi, soliditas, dan solidaritas atau amal jamai. Menurutnya, ketiga hal tersebut telah membuat PKS konsisten bertahan dalam dinamika politik nasional.

“Politik adalah jalan perjuangan. Perjuangan itu butuh militansi yang konsisten, soliditas dalam barisan, dan solidaritas untuk saling menopang,” katanya.

Amin yakin dengan memperkuat tiga modal itu, PKS Lumajang akan semakin siap menghadapi tantangan ke depan sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat.

Sebagai wakil rakyat dari Lumajang dan Jember, Amin juga menekankan pentingnya Musda sebagai momentum merumuskan langkah strategis partai di daerah. Ia berharap PKS semakin hadir dengan solusi konkret bagi persoalan masyarakat, mulai dari pendidikan hingga lapangan kerja.

“Harapan rakyat sangat besar pada PKS. Mari kita jadikan Musda ini pijakan untuk menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat dan menyejahterakan,” pungkasnya.



image istimewa



Untuk memperkuat tiga modal utama partai, yaitu militansi, soliditas, dan solidaritas atau amal jamai. Menurutnya, ketiga hal tersebut telah membuat PKS konsisten bertahan dalam dinamika politik nasional. Politik adalah jalan perjuangan.

Perjuangan itu butuh militansi yang konsisten, soliditas dalam barisan, dan solidaritas untuk saling menopang,”

AMIN AK, M.M.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Timur IV



image istimewa

Hendry Munief Ajak Pengurus DPTD PKS Kepulauan Meranti Kokoh Bersama Memajukan Meranti

Selatpanjang (08/09) – Anggota DPR RI fraksi PKS Dapil Riau 1 H. Hendry Munief MBA menghadiri pelantikan pengurus DPD PKS Kepulauan Meranti. Kegiatan digelar Musyawarah Daerah (Musda) VI di Ballroom Afifa Sport Center, Jalan Banglas, Selatpanjang, Minggu (7/9/2025).

Acara tersebut dihadiri juga Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Riau Syamsudin, Sekretaris Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Riau Darisman Ahmad, Ketua DPD PKS Kepulauan Meranti Edi Amin, Ketua Fraksi PKS DPRD Kepulauan Meranti Al Amin, anggota DPRD Fazrul Amraini dan Tengku Zulkenedy Yusuf, serta sejumlah pengurus dan kader PKS.

Hendry Munief menilai capaian PKS di Kepulauan Meranti cukup signifikan setelah memperoleh tiga kursi atau 10 persen dari 30 kursi DPRD. Menurutnya, pencapaian tersebut menjadi modal politik penting untuk memperluas jejaring dan memperkuat kehadiran partai di tengah masyarakat.

"Ini capaian yang luar biasa. Ke depan, PKS harus memperluas persahabatan politik sebagaimana pesan Presiden RI Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025 yakni : satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit," kata Hendry.

la menjelaskan, ada tiga kunci yang harus diperkuat PKS, yakni kaderisasi yang mengakar di masyarakat, memperluas jejaring persahabatan, serta menghadirkan kontribusi nyata melalui program-program sosial.

Selain politik kebangsaan kader, Hendry Munief juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menyebut, dari 65 juta UMKM di Indonesia, sekitar 272 ribu berada di Provinsi Riau.

"Kontribusi UMKM sangat besar, mencapai 61 persen PDB nasional. Saya berharap program pemberdayaan ekonomi bisa lebih dikembangkan di Kepulauan Meranti melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pusat. Maka saya menekankan, DPD PKS baik di Meranti atau dimana saja harus serius memberikan pelayanan di sektor ekonomi ini dan memperkuat kehadiran partai di tengah masyarakat," tegasnya.

Hendry Munief Ajak Pengurus DPTD PKS Kepulauan Meranti Kokoh Bersama Memajukan Meranti

« SEBELUMNYA

Saat berkunjung pertama kali ke Kepulauan Meranti pada awal 2025, lanjut Hendry Munief, dirinya langsung menemui Bupati Asmar. Ia menyampaikan siap untuk berkolaborasi dan berupaya agar APBN bisa lebih berpihak ke daerah, termasuk Meranti.

"Kita paham situasi defisit yang dialami oleh berbagai daerah pada saat ini. Makanya kami ingin menjolok APBN agar turun ke provinsi Riau, khususnya Kepulauan Meranti," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD

PKS Kepulauan Meranti, Edi Amin, menekankan pentingnya soliditas pengurus dan militansi kader. Menurutnya, arahan Presiden PKS adalah mewujudkan partai yang bersih, peduli, dan profesional dengan program K2P2 (Kaderisasi dan Pemenaangan Pemilu).

"PKS di Meranti siap bersinergi dengan seluruh elemen dan stakeholder untuk mendirikan kesejahteraan masyarakat. Apalagi, kita memiliki tiga anggota DPRD yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai bidangnya masing-masing," ujar Edi.



"Kontribusi UMKM sangat besar, mencapai 61 persen PDB nasional. Saya berharap program pemberdayaan ekonomi bisa lebih dikembangkan di Kepulauan Meranti melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pusat. Maka saya menekankan, DPD PKS baik di Meranti atau dimana saja harus serius memberikan pelayanan di sektor ekonomi ini dan memperkuat kehadiran partai di tengah masyarakat

H. HENDRY MUNIEF, M.B.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau I



Saadiah Uluputty Tekankan Kolaborasi Atasi Prahara Jalan Daerah di Maluku

Ambon (07/09) — Anggota DPR RI Komisi V dari daerah pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, menyoroti serius kondisi infrastruktur jalan di Maluku yang hingga kini masih menyisakan banyak persoalan mendasar.

Menurutnya, prahara jalan nasional dan daerah bukan sekadar soal teknis, melainkan persoalan sistemik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

“Jalan adalah nadi kehidupan. Jika jalan rusak, maka yang terputus bukan hanya akses kendaraan, tetapi juga akses anak-anak ke sekolah, petani ke pasar, dan masyarakat ke layanan kesehatan,” ungkap Saadiah saat kunjungan bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku di Kawatu, Kecamatan Inamosol.

Politisi PKS ini menjelaskan, meski kewenangan antara jalan nasional dan jalan daerah

sudah diatur jelas melalui undang-undang, kenyataannya masyarakatlah yang paling menderita ketika perbaikan tidak segera dilakukan. Jalan nasional relatif lebih baik karena mendapat sokongan APBN, sementara jalan daerah sering terbengkalai akibat keterbatasan APBD, lemahnya perencanaan, hingga tumpang tindih kewenangan.

Saadiah menegaskan, persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan. Ia mencontohkan kondisi di Dusun Kalauli dan Kawatu, di mana longsor dan kerusakan parah membuat jalan nyaris terputus.

“Bagi warga, jalan itu bukan sekadar jalur

transportasi, tetapi jalur harapan. Setiap kilometer jalan yang diperbaiki berarti harga kebutuhan pokok lebih terjangkau, jarak sekolah lebih mudah, dan pelayanan kesehatan bisa lebih cepat,” ujarnya.

Menurut wakil rakyat Maluku ini, solusi atas prahara jalan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan DPR. Sinergi dalam perencanaan, pengawasan, serta pembiayaan menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur berjalan adil dan merata hingga ke pelosok.

“Jalan bukan soal status nasional atau daerah. Masyarakat tidak pernah bertanya siapa yang membiayai. Yang mereka butuh adalah jalan yang aman, kuat, dan bisa dilalui setiap hari. Inilah yang harus kita perjuangkan bersama,” tegas Saadiah.

Saadiah terus mendorong semua pihak untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat Maluku di Senayan.

“Saya membawa suara masyarakat pegunungan Seram, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Kita ingin pembangunan yang tidak hanya berhenti di kota, tetapi sampai ke dusun-dusun. Jalan adalah jembatan menuju keadilan sosial bagi rakyat Maluku,” pungkas Saadiah Uluputty.



“Jalan adalah nadi kehidupan. Jika jalan rusak, maka yang terputus bukan hanya akses kendaraan, tetapi juga akses anak-anak ke sekolah, petani ke pasar, dan masyarakat ke layanan kesehatan,”

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku



Sembako, Aspirasi, dan UMKM: Cara Habib Idrus Rangkul Komunitas Ojol di Tangerang

Tangerang (07/09) – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, kembali menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan serap aspirasi dan pembagian sembako bersama komunitas ojek online (Ojol Speed) di Tangerang, Sabtu (6/9/2025).

Meskipun tidak dapat hadir secara langsung karena adanya agenda kedinasan, Habib Idrus tetap menitikpkan sejumlah poin penting yang disampaikan melalui timnya. Ia menekankan bahwa pertemuan semacam ini sangat penting untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara wakil rakyat dengan komunitas yang sehari-hari menjadi garda depan mobilitas masyarakat.

“Komunitas ojol adalah bagian penting dari denyut kehidupan kota. Mereka tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi

juga menjadi tulang punggung keluarga. Karena itu, aspirasi dan kebutuhan mereka harus mendapat ruang yang layak dalam kebijakan publik,” ujar Habib Idrus dalam keterangannya.

Dalam kesempatan tersebut, Habib Idrus menyampaikan bahwa dirinya berkomitmen memperjuangkan agar komunitas ojol bisa memanfaatkan berbagai program pemerintah yang dibawa melalui jalur legislatif. Beberapa di antaranya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mendukung

pendidikan anak-anak para ojol, serta akses ke berbagai program pemberdayaan UMKM agar mereka dapat memiliki sumber penghasilan tambahan selain dari aktivitas sehari-hari di jalanan.

Ia juga menekankan pentingnya forum-forum aspirasi yang rutin dilakukan. Menurut Habib Idrus, wadah semacam itu bisa menjadi jembatan antara komunitas ojol dengan kebijakan yang sedang dirancang atau diperjuangkan di parlemen. Dengan begitu, suara mereka tidak hanya berhenti di lapangan, tetapi benar-benar bisa masuk ke ruang pengambilan keputusan.

Kegiatan serap aspirasi kali ini turut dirangkai dengan pembagian paket sembako sebagai bentuk kepedulian sosial. Meski sederhana, langkah ini disambut baik oleh para ojol yang hadir, sebagai bukti bahwa kepedulian dari wakil rakyat tetap nyata terasa.

“Bantuan sembako ini hanyalah pintu masuk. Yang lebih penting adalah memastikan agar komunitas seperti Ojol Speed mendapatkan akses terhadap program-program peningkatan kesejahteraan. Kita ingin mereka tidak hanya didengar, tetapi juga difasilitasi untuk berkembang,” imbuh Habib Idrus.

Ke depan, ia berharap pertemuan dengan komunitas ojol dapat dilakukan secara lebih berkesinambungan. Menurutnya, keterlibatan aktif mere-



“Komunitas ojol adalah bagian penting dari denyut kehidupan kota. Mereka tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga menjadi tulang punggung keluarga. Karena itu, aspirasi dan kebutuhan mereka harus mendapat ruang yang layak dalam kebijakan publik

**HABIB IDRUS SALIM
ALJUFRI, Lc., M.B.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten III

ka dalam ruang-ruang aspirasi akan memperkuat jembatan komunikasi antara rakyat dengan parlemen, sekaligus membuka peluang bagi lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat pekerja.

Dengan pendekatan semacam ini, Habib Idrus ingin

memastikan bahwa kehadirannya di DPR RI tidak sebatas formalitas, melainkan betul-betul memberi manfaat nyata bagi konstituen, termasuk bagi para ojol yang telah menjadi bagian penting dari denyut kehidupan masyarakat di perkotaan.A

Bahasa Daerah Bisa Jadi Sumber Karya, Abdul Fikri: Agar Tidak Dikenang sebagai Simbol

Tegal (02/09) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan bahasa daerah agar tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga sumber inspirasi untuk melahirkan karya sastra yang bernilai.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara 'Diseminasi Produk Pengembangan Kebahasaan dan Kesastraan' yang digelar oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Hotel Bahari Inn Tegal pada Sabtu (30/8/2025).

Acara ini merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran bahasa dan sastra dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi sebagai penopang peradaban.

Acara yang dihadiri oleh seniman, guru, novelis, dan

pemerhati sastra dari Tegal, Slawi, dan Kabupaten Tegal ini bertujuan mengajak masyarakat untuk kembali merenungkan bahwa bahasa dan sastra adalah jantung kebudayaan.

Abdul Fikri, yang membuka acara, menyoroti semboyan kebahasaan "Utamakan Bahasa Indonesia, Lestariakan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing."

Bahasa daerah itu harus dirawat, dijadikan sumber inspirasi, agar melahirkan karya sastra bernilai," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa semboyan tersebut tidak boleh dimaknai setengah-setengah.

"Bahasa asing juga kudu digatekna. Setitik-setitik ngerti

ora apa, ben nek ketemu wong asing ora tak-tuk-tak-tuk wae," tambahna dengan logat khas Tegal yang disambut tawa hadirin.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengaku kerap membeli buku-buku berbahasa Tegal, seperti antologi puisi Tegalerin, cerita rakyat, atau novel.

Dalam kesempatan itu, Rektor Universitas Bhamada Slawi, Maufur, untuk membacakan puisi.

Maufur kemudian mendaulat penyair Tegal, Atmo Tan Sidik, untuk naik ke panggung. Sebelum Atmo membacakan puisi berjudul 'Wolu Obat Mumet Kanggo Indonesia,' Maufur menjelaskan sejarah Sastra Tegal yang lahir pada 26 November 1994.

Menurut Maufur, sastra-wan Tegal telah melahirkan empat aliran baru, yakni Wangsi (wangsalan puisi), Kur 267 (puisi pendek tiga baris), Puisi Tegalerin (2-4-2-4), dan Rolasan. Sebagian besar karya ini bahkan telah diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.

Maufur membenarkan hal ini dan menyebut dirinya juga sering menulis puisi serta cerita keseharian dalam bahasa Tegal.

"Kegiatan ini ora mung nostalgia, tapi perlawanan halus supaya basa Tegal tetep urip," kata Maufur sambil tersenyum, menegaskan bahwa bahasa daerah adalah denyut nadi yang mengalirkan identitas.



"Bahasa daerah itu harus dirawat, dijadikan sumber inspirasi, agar melahirkan karya sastra bernilai. Semboyan tersebut tidak boleh dimaknai setengah-setengah. Bahasa asing juga kudu digatekna. Setitik-setitik ngerti ora apa, ben nek ketemu wong asing ora tak-tuk-tak-tuk wae,

**Dr. H. ABDUL
FIKRI FAQIH, MM**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IX



image istimewa

Musda PKS Jateng V, Abdul Kharis Tekankan Kesederhanaan dan Kerja Nyata

Boyolali (07/09) — Ketua Fraksi PKS DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menegaskan pentingnya kesederhanaan dan kekhidmatan dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) PKS.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam Musda PKS ke-V se-Dapil Jawa Tengah 5 yang digelar di Kantor DPD PKS Boyolali, Ahad (7/9).

Menurut Abdul Kharis, Musda tidak perlu digelar secara mewah, melainkan

cukup sederhana, khidmat, dan sah secara aturan partai.

"Yang penting ada proses serah terima jabatan, dan semangat perjuangan tetap terjaga," ujarnya.

Kepada pengurus baru yang resmi dilantik, ia memberikan ucapan selamat sekaligus pesan penting.

"Selamat bekerja, jalankan amanah ini dengan penuh kesungguhan. Target kita jelas: kursi PKS naik, baik di kabupaten/kota, provinsi, maupun di DPR RI," tegasnya.

Lebih lanjut, Abdul Kharis menekankan dua hal utama yang menjadi fokus pergerakan PKS, yakni kader dan kaderisasi.

"Kader harus kita pelihara dan perhatikan. Sementara kaderisasi harus dipercepat dan diperkuat, karena dari sanalah energi perjuangan PKS terus tumbuh," jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menyiapkan strategi

pemenangan pemilu sejak dini.

"Tanpa persiapan matang, mustahil kita bisa mencapai target besar yang telah ditetapkan," tambahnya.

Dalam konteks nasional, PKS disebut selalu siap memberikan dukungan kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subiyanto.

"InsyAllah, pemerintah bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di Indonesia," katanya.

Abdul Kharis juga menegaskan konsistensi PKS dalam mendorong agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Menurutnya, usulan ini sudah lama diperjuangkan PKS, bahkan sejak tahun 2023 melalui inisiatif Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera.

"RUU ini penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi. PKS akan terus mendorong agar segera dibahas dan disahkan," pungkasnya.

"Selamat bekerja, jalankan amanah ini dengan penuh kesungguhan. Target kita jelas: kursi PKS naik, baik di kabupaten/kota, provinsi, maupun di DPR RI,"

**Dr. H. ABDUL KHARIS
ALMASYHARI**

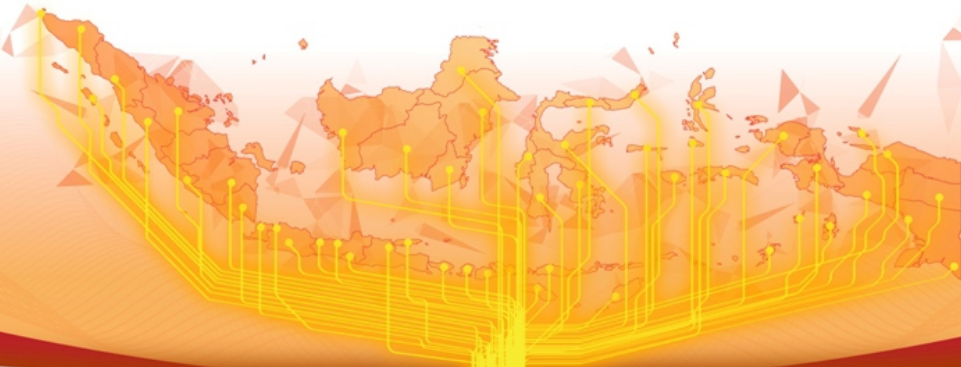
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah V

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kreatif Atraktif Substantif



SUKSESKAN
MUNAS VI
KOKOH BERSAMA
MAJUKAN INDONESIA
28 - 29 SEPTEMBER 2025



Hendry Munief Tegaskan Pentingnya Peran Diaspora untuk Dorong Ekspor UMKM: Aspirasi Harus Sampai ke Presiden

Jakarta (09/09) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan pentingnya langkah konkret untuk memperkuat peran diaspora Indonesia dalam mendorong ekspor UMKM dan IKM nasional agar mampu bersaing di pasar global

Hal ini disampaikan usai menerima audiensi dari Indonesia Diaspora SME Export Empowerment Development (ID SEED) di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, ID SEED menyampaikan keresahan bahwa kontribusi ekspor UMKM Indonesia masih sangat rendah, yakni hanya 15%, sementara posisi Indonesia dalam ekspor di kawasan ASEAN masih berada di urutan kelima. Kendala utama yang dihadapi UMKM antara lain lemahnya daya saing produk,

biaya logistik yang tinggi, dan belum terpenuhinya standar internasional. ID SEED menekankan pentingnya keberadaan “export hub” di setiap provinsi serta perlunya regulasi dan mekanisme yang lebih konkret agar UMKM mampu menembus pasar global.

Menanggapi hal itu, Hendry Munief menekankan bahwa isu ekspor UMKM ini tidak boleh berhenti di level diskusi, tetapi harus diangkat langsung ke tingkat eksekutif tertinggi.

“Saya usulkan agar aspi-

ras ini bisa langsung sampai kepada Presiden Prabowo. Kalau hanya berhenti di sini tanpa ada langkah konkret, maka hasilnya percuma. Karena itu, saya akan mengusulkan agar diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI untuk membahas masalah ini secara serius,” tegas Hendry.

Hendry menilai bahwa langkah awal audiensi ini sudah sangat baik, namun perlu diikuti dengan agenda lebih jauh agar tidak hanya menjadi wacana. Ia juga mendorong rekan-rekan Fraksi PKS di Komisi VII untuk ikut memperjuangkan aspirasi diaspora, sehingga suara ini mendapat bobot politik yang lebih kuat di hadapan pimpinan DPR dan pemerintah.

“Akan berbeda hasilnya jika aspirasi ini disampaikan secara resmi dalam forum Komisi VII, dibanding hanya melalui saya secara personal. Karena itu, kita perlu bergerak lebih konkrit, bukan hanya diskusi panjang tanpa arah,” ujar Hendry.

Dengan demikian, Hendry menegaskan bahwa PKS melalui peran di Komisi VII DPR RI siap menjadi mitra strategis diaspora dalam memperjuangkan ekosistem ekspor UMKM, sekaligus mengawal agar aspirasi ini masuk ke dalam kebijakan pemerintah, termasuk dalam alokasi APBN.



“Saya usulkan agar aspirasi ini bisa langsung sampai kepada Presiden Prabowo.

Kalau hanya berhenti di sini tanpa ada langkah konkret, maka hasilnya percuma. Karena itu, saya akan mengusulkan agar diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI untuk membahas masalah ini secara serius

H. HENDRY MUNIEF, M.B.A.

Anggota Komisi VII DPR RI



Anak Muda Didorong Aktif Kawal Pemerintah, Fraksi PKS DPR RI Tegaskan Pentingnya Peran Civil Society

Jakarta (09/09) --- Rombongan siswa SMK Pembangunan melakukan Kunjungan Edukasi dalam Agenda Aspirasi ke Ruang Pleno, Gedung Nusantara I, DPR RI, Selasa (09/09). Rombongan diterima langsung oleh Tenaga Ahli Bidang Aspirasi Fraksi PKS.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa anak muda memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan, khususnya dalam proses legislasi di DPR RI.

"PKS melalui Presiden dan Sekjen sudah tegas dan sangat gamblang untuk mendukung dan mendorong DPR menyambut tuntutan masyarakat. DPR pun telah mengambil langkah nyata, misalnya menonaktifkan kebijakan tertentu. InsyaAllah, PKS tetap terdepan dalam memperjuangkan kepentingan umat. Fraksi PKS juga menjaga agar tindakan kader selalu sesuai akhlak kharimah," papar Tenaga Ahli Fraksi PKS, Andi Amrullah.

Ia menekankan bahwa proses pengambilan keputusan di DPR sebagian besar dilakukan secara musyawarah mufakat.

"InsyaAllah, ini segera diproses DPR RI. Semua partai pada umumnya sepakat menjadikan sejumlah rancangan undang-undang sebagai prioritas. Teman-teman sebagai civil society harus mengontrol tindakan di DPR. Transparansinya bisa

langsung disaksikan, misalnya lewat siaran real-time di YouTube saat pengesahan UU berlangsung," jelasnya.

Menurutnya, kontrol masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga agar keputusan DPR berjalan sesuai aspirasi rakyat.

"DPR ini punya mitra, yakni eksekutif, presiden dan jajaran. Kalau DPR mau bahas, tapi pemerintah tidak, ya susah. Harus sejalan keduanya. Karena itu

peran masyarakat sebagai pengawas sangat penting," tambahnya.

Ia juga mendorong generasi muda agar semakin kritis dan substantif dalam memberikan masukan.

"Sekarang ini peran civil society lebih efektif, bisa menjadi alasan kuat bahkan mengoreksi rancangan undang-undang yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat," ungkapnya.

Ia menutup dengan pesan agar generasi muda tidak abai terhadap perannya dalam menjaga bangsa.

"Kita sebagai anak bangsa harus saling menyanggah dan mengawasi. Kontrol yang baik akan membuat program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan rakyat," pungkasnya.

"InsyaAllah, ini segera diproses DPR RI. Semua partai pada umumnya sepakat menjadikan sejumlah rancangan undang-undang sebagai prioritas. Teman-teman sebagai civil society harus mengontrol tindakan di DPR. Transparansinya bisa langsung disaksikan, misalnya lewat siaran real-time di YouTube saat pengesahan UU berlangsung,

DR. ANDI AMRULLAH
Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI



Fraksi PKS Tegaskan Spirit Proklamasi Lewat Lomba Baca Teks Bung Karno: Nasionalisme Harus Terus Menyala

Jakarta (9/9) — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menegaskan pentingnya menghidupkan kembali semangat proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai momentum memperkokoh nasionalisme.

Dalam rangka itu, Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Lomba Baca Teks Proklamasi ala Bung Karno yang mendapat respons positif dari masyarakat luas.

Abdul Kharis menekankan bahwa proklamasi bukan hanya simbol kemerdekaan, tetapi juga tonggak sejarah yang harus terus dihayati dan diisi oleh seluruh elemen bangsa.

“Sosok Soekarno diharapkan jadi teladan dalam perjuangan kita mengisi tongkat estafeta kemerdekaan,” ujar Abdul Kharis.

Kegiatan lomba ini diikuti peserta dari berbagai daerah dengan antusias tinggi. Fraksi PKS DPR RI melihat kegiatan



**PENUTUPAN & PENGUMUMAN
PEMENANG LOMBA**

**BACA TEKS
ALA BUNGG KARNOW**
SEASON 1 2025

tersebut sebagai wahana kebersamaan sekaligus memperkuat tali persaudaraan antarwarga.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta lomba baca teks

proklamasi serta masyarakat yang telah memberikan dukungan. Selamat kepada para pemenang yang telah menampilkan semangat Bung Karno dalam membacakan teks proklamasi,” tambahnya.

Abdul Kharis berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada momentum perayaan, melainkan menjadi pengingat sekaligus penggerak bagi generasi bangsa.

“Kami ingin agar bangsa Indonesia dapat terus meneladani Bung Karno dan Bung Hatta dalam menata Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, dan sejahtera, sekaligus menjadi motor perbaikan peradaban dunia,” tegasnya.

Melalui lomba ini, Fraksi PKS DPR RI menegaskan komitmennya untuk menjaga spirit kemerdekaan, memperkuat nasionalisme, dan menghidupkan kegiatan kebangsaan yang mendekatkan rakyat dengan nilai luhur proklamasi.



“Kami ingin agar bangsa Indonesia dapat terus meneladani Bung Karno dan Bung Hatta dalam menata Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, dan sejahtera, sekaligus menjadi motor perbaikan peradaban dunia,”

**Dr. H. ABDUL KHARIS
ALMASYHARI**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Waka FPKS Sukamta Tegaskan Proklamasi Bukan Seremonial: Momentum Sakral untuk Bangun Bangsa Bermartabat

Jakarta (09/09) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Komisi I, Sukamta, menegaskan bahwa proklamasi 17 Agustus 1945 adalah peristiwa sejarah sakral yang harus dimaknai lebih dari sekadar upacara tahunan.

Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Lomba Baca Teks Proklamasi ala Bung Karno yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Proklamasi adalah nikmat terbesar bagi bangsa Indonesia, nikmat yang tidak semua bangsa di dunia merasakannya hingga kini. Karena itu, kita wajib menyukuri sekaligus menjaga kemerdekaan ini dengan sepenuh jiwa,” ujar Sukamta.

Menurutnya, proklamasi harus menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa untuk meneladani perjuangan para pendiri republik.

“Kemerdekaan ini diraih



**PENUTUPAN & PENGUMUMAN
PEMENANG LOMBA**

**BACA TEKS
ALA BUNG KARNO**

SEASON 7 2025

dengan peluh dan darah para pejuang. Lomba baca teks proklamasi ini bukan sekadar seremonial, tetapi cara kita memaknai nilai-nilai proklamasi

agar terus hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Sukamta menekankan pentingnya meneladani suara lantang Bung Karno saat membacakan teks proklamasi sebagai simbol keberanian menyuarakan kebenaran. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta lomba dan panitia yang telah berkontribusi merawat kesadaran akan nilai kemerdekaan.

“Kami yakin dengan optimisme dan semangat proklamasi, Indonesia akan menjadi negara besar, makmur, berdaulat, dan bermartabat di mata dunia,” pungkasnya.

Melalui inisiatif ini, Fraksi PKS DPR RI meneguhkan komitmennya untuk menjaga nilai luhur proklamasi, memperkokoh nasionalisme, dan menyalakan optimisme bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa unggul yang membawa kebaikan bagi dunia.



“Kemerdekaan ini diraih dengan peluh dan darah para pejuang. Lomba baca teks proklamasi ini bukan sekadar seremonial, tetapi cara kita memaknai nilai-nilai proklamasi agar terus hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,”

H. SUKAMTA, Ph.D

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Polhukam



Sambut Hari Olahraga Nasional, Reni Astuti Luncurkan Senam "Bergerak Bersama Bu Reni" Ajak Masyarakat Hidup Sehat

Jakarta (09/09) --- Menyambut momentum Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2025, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Jawa Timur I (Surabaya-Sidoarjo), Reni Astuti

meluncurkan senam bertajuk "Bergerak Bersama Bu Reni" sebagai ajakan kepada masyarakat untuk hidup sehat dengan berolahraga.

Menurut Reni, senam menjadi pilihan olahraga yang murah, meriah, sekaligus digemari masyarakat.

"Siapa pun bisa ikut serta, karena senam tidak membutuhkan biaya besar. Saya ingin mengajak masyarakat untuk terus bergerak dan menjaga kesehatan," ujar politisi PKS asal Surabaya itu.

Sebagai Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi isu Olahraga bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, Reni memiliki perhatian khusus terhadap isu - isu Olahraga.

Reni menekankan, olahraga

adalah investasi penting untuk menjaga produktivitas hidup.

"dengan giat olahraga, tubuh kita akan terjaga kebugarannya. Dan ini akan berpengaruh pada produktivitas harian kita.," ujar Reni.

Reni sejak kecil sudah aktif ikut giat Olahraga, seperti Atletik, lari, bahkan menjadi atlet voli lokal. Sehingga ia merasakan betul manfaat dari giat Olahraga yang sejak dulu hingga sekarang dilakukan terhadap produktivitas harian dirinya.

Kehadiran Senam Bergerak Bersama Bu Reni menjadi kontribusi konkret untuk memberikan variasi gerakan senam yang dapat dinikmati masyarakat.

"Saya berharap senam ini

bisa menjadi salah satu alternatif olahraga yang menyenangkan sekaligus menyehatkan," imbuhnya.

Hari Olahraga Nasional sendiri ditetapkan melalui Keppres No. 67 Tahun 1985, yang merujuk pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama di Stadion Sriwedari, Solo, 9-12 September 1948, yang kemudian prestasi Indonesia di bidang olahraga terus mengalami peningkatan.

Tahun ini, Haornas mengusung tema "Mempereratkan Indonesia Melalui Olahraga" dengan tagline "Olahraga Satukan Kita."

Sejalan dengan itu, Reni menegaskan pentingnya pola hidup sehat sebagai pondasi dalam membangun generasi yang kuat.

"Olahraga bukan hanya tentang fisik, tetapi juga membentuk mental dan karakter. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan agar bisa menghadirkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaya," pungkasnya.



"Olahraga bukan hanya tentang fisik, tetapi juga membentuk mental dan karakter. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan agar bisa menghadirkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaya,"

RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM.

Anggota Komisi X DPR RI



Solusi Pemberantasan Korupsi, Kholid Dukung Pengesahan RUU Perampasan Aset

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Kholid merespons tuntutan salah satu aspirasi yang disampaikan oleh demonstran terkait pengesahan RUU Perampasan Aset.

"Korupsi bukan sekadar tindak pidana ekonomi. Ia adalah perampasan hak rakyat. Karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus menjamin bahwa hasil kejahatan tidak bisa dinikmati oleh siapapun. RUU Perampasan Aset adalah solusi rasional, adil, efektif dan tegas untuk menutup ruang itu," ujar Kholid kepada media, di Jakarta, Senin (1/9/2025).

RUU ini mengusung prinsip non-conviction based asset forfeiture, yaitu mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu vonis pidana. Prinsip ini memungkinkan negara untuk segera menyita harta hasil tindak pidana, meskipun pelakunya melarikan diri, meninggal dunia, atau lolos karena alasan teknis hukum.

Selain itu, RUU ini

dilengkapi dengan mekanisme beban pembuktian terbalik terbatas, di mana pihak tertuduh maupun ahli warisnya wajib membuktikan bahwa harta yang mereka miliki bukan berasal dari tindak pidana. Seluruh proses akan dijalankan melalui peradilan khusus dengan mekanisme cepat, sehingga tetap menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum.

"Dengan cara ini, RUU Perampasan Aset bukan menambal masalah, melainkan menghadirkan solusi: adil bagi rakyat, tegas bagi tindakan pidana korupsi, dan efektif dalam proses penegakan hukum," jelas Politisi Fraksi PKS ini.

RUU ini secara komprehensif mengatur objek yang dapat dirampas, yaitu mulai dari harta hasil tindak pidana, harta yang digunakan untuk kejahatan,

hingga harta hasil korupsi yang dialihkan kepada pihak lain. Pengelolaan aset rampasan akan dilakukan secara profesional dengan transparansi publik yang dijamin melalui mekanisme Pusat Pemulihan Aset (PPA), Kejaksaan, dan KPK.

Lebih jauh, pengesahan RUU ini akan menyelaraskan hukum Indonesia dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan standar Financial Action Task Force (FATF). Hal ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang serius dalam pemberantasan korupsi.

Ia menegaskan, dukungan terhadap RUU Perampasan Aset merupakan bagian dari komitmen politik dan moral untuk menjaga integritas pejabat publik serta melindungi kepentingan rakyat.

"RUU ini bukan sekadar regulasi teknis. Ia adalah simbol keberanian negara untuk menegakkan keadilan, memastikan pejabat publik atau pejabat negara tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya, dan



"Korupsi bukan sekadar tindak pidana ekonomi. Ia adalah perampasan hak rakyat. Karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus menjamin bahwa hasil kejahatan tidak bisa dinikmati oleh siapapun. RUU Perampasan Aset adalah solusi rasional, adil, efektif dan tegas untuk menutup ruang itu,"

**H. MUHAMMAD
KHOLID, S.E., M.Si.**

Anggota Komisi III DPR RI

mengembalikan kepada negara setiap rupiah yang menjadi hasil kejahatan korupsi. Karena itu,

kami meminta RUU ini segera disahkan tanpa ditunda-tunda lagi," pungkas Kholid. (bia/aha)



Website
fraksi.pks.id



Instagram
fraksipksdprri



Youtube
PKSTV DPR RI



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



X (Twitter) | @FPKSDPRRI
Fraksi PKS DPR RI



Tiktok
Fraksi PKS DPR RI



Telegram
Fraksi PKS DPR RI



Whatsapp
Fraksi PKS DPR RI

**Nantikan
Setiap Pekan**